

BAB I

PENDAHULUAN

Problematika dalam Hubungan Internasional menurut penulis adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Segala kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh sebuah negara atau sebuah organisasi pasti akan banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak, baik itu respon positif maupun negatif. Dalam Hubungan Internasional banyak sekali ditemukan kasus dimana sebuah negara atau rezim internasional yang mempertahankan atau membela kepentingan kaum yang bersangkutan guna mencapai tujuan strategis dan menciptakan perdamaian dunia. Banyak yang telah berhasil namun tidak sedikit juga gagal bahkan sampai menimbulkan konflik berkepanjangan yang berpotensi merusak hubungan antar negara dengan negara atau negara dengan organisasi.

A. Latar Belakang Masalah

Australia dan Indonesia pada dasarnya adalah kedua negara yang tidak bisa dipisahkan, Indonesia memiliki peran penting untuk Australia, begitupun Australia untuk Indonesia. Situasi demikian mewajibkan kedua negara untuk mampu menciptakan hubungan bilateral yang sehat agar dapat mewujudkan kestabilan dan keamanan dalam interaksi politik internasional.

Namun faktanya dalam sebuah hubungan memang kerap diwarnai dengan nuansa – nuansa yang memperkeruh hubungan tersebut dari waktu ke waktu. Mulai dari konfrontasi antara pihak Indonesia dan Malaysia, masalah kaum separatist Papua

dan persoalan timor – timor di masa order baru dulu. Banyak nya konflik dan konfrontasi yang terjadi selama beberapa dekade ini tidak membuat hubungan kedua negara goyah, kedua negara masih mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan baik.

Terbongkarnya kasus penyadapan oleh Intelejen Australia terhadap Presiden Indonesia, Ibu negara dan beberapa Menteri negara Indonesia menambah panjang daftar konflik dan konfrontasi yang terjadi antara kedua negara. Dalam kasus ini Indonesia mulai bersikap keras terhadap Australia yang membuat hubungan bilateral kedua negara mengalami ketegangan.

Kasus penyadapan ini di ketahui berdasarkan informasi yang dibocorkan oleh mantan pegawai NSA (National Security Agency) milik Amerika Serikat yang bernama Edward Snowden. Snowden menyatakan bahwa terdapat sekitar 90 negara termasuk Indonesia yang disadap oleh badan intelejen AS dan Australia. Penyadapan oleh pihak Australia di lakukan oleh DSD (Defence Signal Directorate) yang merupakan badan intelejen Australia.

Penyadapan kepada Presiden, Ibu Negara dan para Pejabat tinggi Indonesia dilakukan sebanyak 15 kali pada tahun 2009¹, Kejadian ini membuat Indonesia kecewa serta marah karena merasa Australia telah melecehkan dan merendahkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga merasa bahwa hubungan bilateral yang lama telah terjalin tidak membuat Australia menjadi negara

¹ Astarlia Spied On President Leaked Documents Reveal, <http://www.abc.net.au>, Diakses pada tanggal 8 September 2017

tetangga yang baik.

Ancaman penyadapan terhadap pemerintah Indonesia memang sudah lama disadari oleh pihak militer Indonesia, sebuah peringatan pernah disampaikan oleh mantan KSAD (Kepala Staff Angkatan Darat) yang menjabat pada saat itu Jenderal Ryamizard Ryacudu, beliau mengatakan bahwa sekurang – kurangnya ada sekitar 60 ribu intelejen asing yang berada di Indonesia, mereka menyamar dan melakukan infiltrasi dengan berbagai macam profesi seperti wartawan, jurnalis, peneliti, dan para tokoh LSM.².

Namun pada saat itu memang isu ini belum menjadi perhatian serius bagi pembenahan keamanan rahasia Negara. Australia mengatakan bahwa alasan mereka melakukan penyadapan terhadap Indonesia karena selain sebagai mitra dalam hubungan bilateral, Indonesia juga merupakan ancaman bagi Australia, mengingat dalam satu dekade terakhir banyak warga Negara Australia yang berada di Indonesia menjadi korban bom bunuh diri, seperti tragedi bom Bali.

Tindakan penyadapan ini menjadi cambuk untuk Indonesia dalam menata kembali sistem keamanan dan informasi negara, memang bukan hal yang mudah karena Indonesia masih menyewa satelit untuk urusan komunikasi kenegaraan³. mungkin setelah kejadian ini Indonesia akan mulai berpikir untuk mengembangkan satelit untuk komunikasi kenegaraan agar mencegah kejadian seperti ini terulang

² KSAD, 60 ribu Intelijen Asing berkeliaran di Indonesia, Tempo, Edisi 5 Desember 2003

³ Upaya Indonesia Mengatasi Penyadapan, <http://www. antarasumut.com>, Diakses pada tanggal 8 Spetember 2017

kembali.

Atas kejadian penyadap Indonesia oleh intelejen Australia, warga negara Indonesia mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memutuskan hubungan bilateral dengan Australia, karena masyarakat merasa bahwa putusnya hubungan bilateral antar kedua negara akan sangat merugikan pihak Australia. Namun ternyata ada juga pihak – pihak yang tidak menginginkan putusnya hubungan antara kedua negara, peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M. Haripin menyatakan bahwa kedua negara tidak siap menghadapi putusnya hubungan karena pada dasarnya kedua negara memiliki ketergantungan yang sama besarnya.

Sebagai respon atas tindakan ini menteri luar negeri Indonesia pada saat itu Marty Natalegawa memanggil Duta besar Indonesia di Canberra untuk pulang dan berunding bersama untuk melakukan konsultasi⁴. Pemerintah Indonesia meminta kepada rakyat dan masyarakat untuk tetap tenang karena pemerintah akan bekerja dengan serius sesuai dengan tugas dan kebijakan yang harus pemerintah jalankan dalam menyikapi kasus penyadapan tersebut.⁵

Penyadapan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional yang berbunyi: “suatu negara dilarang melakukan aktivitas kenegaraan, golongan dan individual di wilayah kedaulatan negara lain tanpa izin”. Pelanggaran

⁴ Indonesia Panggil Dubes Australia soal dugaan mata-mata/<http://www.voaindonesia.com> Diakses pada tanggal 8 September 2017

⁵ Presiden minta rakyat tenang sikapi penyadapan, <http://www.antaraneews.com>, diakses tgl 8 September 2017

prinsip hukum kebiasaan internasional yang dilanggar oleh Australia didukung dengan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia di dalam teritorial negara yang disadap, yaitu di Indonesia.

Tindakan penyadapan juga merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 pasal 3 tentang hubungan diplomatik, yang berbunyi: “salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah mengumpulkan informasi keadaan negara penerima secara akurat dan dengan cara yang sah untuk kemudian dilaporkan kepada negara pengirim”. Praktek penyadapan atau spionase adalah hal yang sudah terjadi sejak lama, hal ini biasa dilakukan oleh aktor – aktor Internasional yang didasari adanya kekhawatiran akan gangguan kedaulatan oleh negara lain, khususnya bagi negara yang bertetangga seperti Indonesia dan Australia. Hal semacam ini juga sudah dilakukan oleh AS dan Uni Soviet sejak masa perang dingin dulu.

Penyadapan muncul bersamaan dengan perkembangan alat telekomunikasi dan informasi, yakni diawali dengan munculnya telegraf, telepon, dan jaringan internet saat ini. Keterlibatan alat-alat telekomunikasi dan informasi yang semakin lama semakin berkembang ini dimanfaatkan untuk kepentingan jaga-jaga, namun kenyataannya seringkali digunakan sebagai sarana untuk keuntungan dari sebuah negara.

Dari latar belakang tersebutlah penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Aksi Penyadapan Australia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia”**, karena penulis menganggap kasus tersebut menarik untuk dikaji demi menambah khasanah akademik bagi penulis maupun para pecinta

ilmu Hubungan Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan persoalan atau permasalahan mengenai **“Apa Penyebab dan Pengaruh Aksi Penyadapan Australia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia (Tahun 2009-2010) ?”**

C. Kerangka Teori

Teori muncul dan berkembang adalah karena telah melampaui pemikiran logis. Karena dengan logika, orang diajak untuk bisa berfikir benar. Mochtar Mas'ood dalam bukunya “Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi” menjelaskan bahwa teori bukanlah dugaan. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”. Artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.

Pernyataan yang disebut teori tersebut berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi tersebut terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Tapi, teori bukan sekedar kumpulan generalisasi, teori adalah pernyataan yang menjelaskan generalisasi tersebut. Sebagai sarana eksplanasi, teori adalah yang paling efektif. Teori juga membantu dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang diteliti.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional pasti terdapat interaksi di dalamnya. Interaksi itu tidak akan bisa terjadi tanpa adanya interest atau kepentingan yang menyertainya. Aktor sebagai pelaku interaksi tentu memiliki kepentingan dalam melakukan interaksi dengan aktor lain. Setiap aktor memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda dan masing-masing pihak tentu ingin tujuan dan kepentingannya tercapai, sehingga ada kalanya antara aktor satu dengan aktor lain saling berhubungan dengan erat dan saling bekerja sama.

Namun ada kalanya pula aktor-aktor tersebut saling bermusuhan dan terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, dalam tulisan ini Penulis akan menjelaskan mengenai apa yang disebut sebagai national interest atau yang bisa disebut sebagai kepentingan nasional.

Kepentingan nasional merupakan salah satu unsur interaksi selain aktor dan power. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan nasional itu? Definisi mengenai kepentingan nasional itu sendiri beragam dan sampai saat ini masih menjadi sebuah ambiguitas. Hal ini membuktikan bahwa konsep kepentingan nasional telah membuktikan sebagai konsep yang cukup tangguh⁶. Konsep kepentingan nasional

⁶ Rochester, J. Martin, 1978. "The "National Interest" and Contemporary World Politics" *The Review of Politics*, 40 (1), hal 77.

mengacu pada tercapainya tujuan pemerintah suatu negara di dunia internasional⁷. Kepentingan nasional juga mengacu pada prinsip umum diplomasi⁸.

Kepentingan nasional diekspresikan sebagai tujuan kekuasaan, dan terdiri dari hal-hal yang mencakup identitas fisik, identitas politik, dan identitas budaya, elemen yang cukup dasar dan cukup bertahan lama yang berasal dari permintaan dari banyak kelompok kepentingan dan tekanan dari aktor-aktor domestik⁹

Menurut Hans J. Morgenthau¹⁰, kepentingan nasional dibagi menjadi dua, yakni kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital adalah kepentingan yang mencakup sudut pandang kepentingan nasional yang sangat dibutuhkan sehingga tidak dapat diganggu gugat dan harus tercapai. Sedangkan kepentingan sekunder adalah kepentingan yang sewaktu-waktu dapat tumbuh menjadi kepentingan vital, sehingga masih dapat dibantah dan dinegosiasikan. Jika suatu hal termasuk dalam kepentingan sekunder, maka hal itu dapat dinegosiasikan untuk

⁷ Oppenheim, Felix E., 1987. "National Interest, Rationality, and Morality" *Political Theory*, 15 (3), hal, 370.

⁸ Clinton, W. David, 1986. "The National Interest: Normative Foundations" *The Review of Politics*, 48 (4), hal, 500.

⁹ Hyndman, James E, 1970/1971. "National Interest and the New Look" *International Journal*, 26 (1), hal. 7

¹⁰ Morgenthau, Hans J., 1962. *The Impasse of American Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press, hal. 191

menjadi keuntungan asalkan pihak lain tidak menerapkan kebijakan ekspansionalisme¹¹.

Yang termasuk dalam kepentingan vital adalah politik, ideologi, serta pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan apabila salah satunya terganggu, maka perkembangan dan kelangsungan hidup suatu negara akan terhambat atau bahkan mengalami kemunduran. Sementara yang termasuk dalam kepentingan sekunder adalah selain tiga hal tersebut, seperti budaya.

Seiring dengan berkembangnya waktu, kepentingan nasional tidak lagi dibagi berdasarkan prioritas atau urgensinya saja. Namun, kepentingan nasional dibagi lagi berdasarkan durasi, spesifikasi, dan kompatibilitas. Kepentingan berdasarkan durasi dibagi menjadi kepentingan sementara dan kepentingan permanen. Kepentingan berdasarkan spesifikasi dibagi menjadi kepentingan umum dan kepentingan khusus. Sedangkan kepentingan berdasarkan kompatibilitas dibagi menjadi kepentingan komplementer dan kepentingan konflik¹²

Dalam membuat dan membentuk suatu kepentingan nasional, tentu ada motivasi dibaliknyanya. Motivasi ini biasanya disebut sebagai maker motivations. Apa sajakah maker motivations itu? Maker motivations terdiri dari ideologi, organisasi,

¹¹ Roskin, Michael G., 1994. National Interest: From Abstraction to Strategy. USA: US Army War College. hal. 5

¹² Roskin, Michael G., 1994. National Interest: From Abstraction to Strategy. USA: US Army War College. hal. 6

strategi ekonomi, dan individu. Motivasi ideologi adalah motivasi yang mendasari untuk memenuhi kepentingan nasional dengan cara menanamkan atau memaksa ideologinya kepada aktor-aktor lain. Sedangkan motivasi strategi ekonomi adalah motivasi yang mendasari untuk memenuhi kepentingan nasional melalui ekonomi agar perekonomian negaranya menjadi lebih maju. Sementara motivasi organisasi adalah motivasi yang mendasari kepentingan antar aktor untuk mendapatkan kepentingan nasional melalui organisasi-organisasi yang dibentuk.

Contoh paling mudah dari ketiga motivasi tersebut adalah ketika terjadi Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menanamkan pengaruhnya pada negara lain pasca Perang Dunia II. Perebutan pengaruh tersebut mencakup penanaman ideologi, pemberian bantuan ekonomi dan militer pada negara lain. Terakhir, yakni motivasi individu adalah motivasi yang mendasari untuk memenuhi kepentingan nasional yang melibatkan aktor individu. Contoh dari motivasi individu adalah ketika pemerintah menjalankan tugasnya, seperti Hitler, Stalin, Truman, serta para pemimpin lainnya.

Suatu negara tentu tidak mungkin hanya memiliki satu kepentingan nasional saja. Kepentingan nasional suatu negara tentu beragam dan mencakup banyak hal. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai dimensi kepentingan nasional. Dimensi kepentingan nasional merupakan hal dasar yang harus ada di setiap kepentingan.

Menurut Donald E. Nuechterlein¹³, dimensi dalam kepentingan nasional mencakup beberapa aspek seperti tatanan dunia, ekonomi, pertahanan, dan ideologi.

Menurut Michael G. Roskin terdapat dua tingkatan dalam kepentingan nasional, yang pertama bersifat tetap dan yang kedua kepentingan nasional yang bersifat aktual. Kepentingan nasional yang bersifat tetap ada adalah sebuah kepentingan negara merdeka untuk melindungi institusi-institusi negara, rakyat, dan nilai-nilai dasarnya. Sedangkan kepentingan nasional yang aktual adalah segala kepentingan yang tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan sebuah negara.

Para ahli memiliki definisi yang berbeda dalam mendefinisikan *National Interest* / Kepentingan Nasional. Hans Morgethau dalam *Politics Among Nations* menyebut kepentingan nasional sebagai suatu *Power* yang dapat diartikan sebagai pengaruh/kekuasaan/kekuatan. Berbeda dengan Morgenthau, Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional secara deskriptif dan normatif ; secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan Negara lain.

Kebijakan politik luar negeri yang dibuat oleh para pembuat keputusan sangat mengacu pada konsep kepentingan nasional yang digambarkan oleh Jack C. Plano

¹³ Neuchterlein, Donald E., 1991. *America Recommitted: United States National Interests in a Restructured World*. Lexington: University Press of Kentucky.

dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah hal yang paling mendasar dan yang sangat vital bagi sebuah negara untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹⁴

Dalam konsep kepentingan nasional ini ada lima kategori yang dapat dikatakan sebagai target utama yaitu :

(1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga dirinya dari berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara;

(2) *independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap negara berhak untuk merdeka dan sudah merupakan hak nya sebagai negara dan juga dimana negara tidak untuk patuh terhadap negara lain;

(3) *territorial integrity*, negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau teritorial negaranya;

(4) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain;

¹⁴ Plano Jack C. Dan Olton Roy, *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ke-3*, diterjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda, CV Putra A Bardin, Agustus 1999, Hal 7.

(5) *economic wellbeing*, atau dapat disebut kesejahteraan ekonomi, sektor ekonomi harus selalu dijamin kesetabilannya oleh pemerintah agar tercipta kesejahteraan di negara tersebut.¹⁵

Kebutuhan suatu negara adalah hal yang paling dasar dalam menciptakan sebuah kepentingan nasional, kebutuhan disini meliputi apa – apa saja yang terjadi di dalam negara tersebut, baik itu kondisi politik, ekonomi, militer dan sosial budaya. Sebuah negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan seluruh warga negara dan menyediakan segala yang dibutuhkan agar terciptanya kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Kasus penyadapan oleh intelejen Australia kepada pemerintah Indonesia sudah pasti memiliki motif kepentingan nasional yang kuat, mengingat Australia telah mengetahui bagaimana resiko yang dapat mereka terima jika Indonesia mengetahui aksi mereka ini. Secara garis besar Australia adalah sekutu dari Amerika Serikat yang sudah pasti menitipkan amanah kepada mereka untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara – negara di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia.

2. Konsep Interdependensi

¹⁵ Plano Jack C. Dan Olton Roy, Ibid. Hal 128.

Jika konsep Kepentingan Nasional maupun konsep Kerjasama merupakan konsep klasik yang eksistensinya masih relevan dalam studi Hubungan Internasional Kontemporer, Interdependensi merupakan salah satu konsep yang tergolong baru.

Dalam literature-literatur HI pada decade 1920-an hingga 1960-an konsep interdependensi jarang atau bahkan sulit ditemukan. Konsep ini memang baru mulai mewarnai analisis-analisis tentang hubungan internasional sejak dasawarsa 1970-an bersamaan dengan mulai disebut-sebutnya konsep globalisasi oleh para ahli HI.¹⁶

Secara *leksikal*, interdependensi berarti saling ketergantungan antarnegara.¹⁷ Saling ketergantungan timbul karena setiap Negara pasti memiliki kekurangan di tengah keunggulan komparatifnya masing-masing. Kekurangan dan keunggulan komparatif yang dimiliki setiap Negara inilah yang mendorong lahirnya kerjasama bilateral maupun multilateral.¹⁸ Kerjasama ini pada gilirannya menyebabkan saling ketergantungan antarnegara dimana mereka saling membutuhkan satu sama lainnya.

Luke Ashworth membedakan definisi interdependensi dalam arti sempit (*Narrow Definition*) dan dalam arti luas (*Broader Definition*), dalam arti sempit interdependensi mengacu pada hubungan-hubungan ekonomi dan social, khususnya hubungan ekonomi antar Negara.¹⁹ Adapun dalam arti luas interdependensi dapat merujuk pada sejumlah interkoneksi antar masyarakat dan antarnegara, karenanya

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, hal. 77.

dapat dimaknai sebagai sebuah kondisi alamiah dari semua masyarakat manusia.²⁰ Sebab itu dalam arti luas, ide-ide terkait dengan interdependensi sebenarnya lebih dahulu ada dari liberalism maupun studi HI itu sendiri.²¹ Menurut Ashworth, esensi dari konsep interdependensi adalah gagasan *natural unity of humanity*, sehingga sebagai ide interdependensi sebenarnya sudah lama berkembang dalam sejarah umat manusia.²²

Menurut Waheeda Rana, interdependensi merupakan sebuah situasi dalam politik dunia dimana semua aktor (baik Negara maupun aktor non-negara) saling ber-ketergantungan satu sama lain.²³ Graham Evans dan Jeffrey Newnham menyatakan, interdependensi dalam politik dunia menyiratkan bahwa aktor-aktor saling terkait (*interrelated*) atau saling terhubung (*interconnected*), sehingga sesuatu yang terjadi dalam suatu aktor, dalam suatu kesempatan atau dalam suatu tempat akan mempengaruhi semua aktor.²⁴

3. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama antar-negara (*International Cooperation*) telah menjadi perhatian utama sejak awal kelahiran studi HI sebagai disiplin akademis.²⁵ Saat itu kerja sama antarnegara dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*)

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, Hal 78.

²⁵ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2017. Hal 73.

atau mencegah terjadinya peperangan (*to prevent war*).²⁶ Kini orientasi kerjasama antarnegara telah meluas ke berbagai bidang dan menjadi kebutuhan hampir semua Negara di Dunia.²⁷ Semakin banyaknya interaksi antarnegara dalam bentuk kerja sama, memaksa studi HI tetap menjadikan kerja sama sebagai salah satu konsep dasar yang esensial bersama dengan sejumlah konsep lainnya.²⁸

Kerjasama bilateral antar negara adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak dahulu, hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bekerja sama atau beraliansi dengan negara lain, tidak peduli seberapa maju dan berkembangnya negara tersebut, hal ini adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Ada sejumlah pengertian mengenai kerjasama yang bervariasi yang dibuat oleh para pemuka Hubungan Internasional. Robert Keohane menyebutkan bahwa kerja sama terjadi ketika para aktor (*states* ataupun *non states actors*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang actual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan.²⁹ Josep Frankel mengatakan bahwa Negara-negara akan melakukan kerjasama apabila manfaat yang diperoleh mereka diperkirakan lebih besar

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya.³⁰ Sedangkan Daniel Feri membedakan kerjasama internasional dalam 2 (dua) pendekatan dasar, yaitu *public choice approach* dan *public goods approach*; *public choice approach* adalah perilaku aktor-aktor internasional (apakah itu merepresentasikan Negara-negara, organisasi-organisasi Internasional, perusahaan-perusahaan multinasional dan lain sebagainya) dipahami sebagai usaha untuk memaksimalkan kegunaan fungsinya masing-masing dengan hambatan-hambatan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, adapun *public goods approach* merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada penjelasan tentang tipe-tipe tertentu dari kerjasama dan partisipasi yang timbul dalam hubungan internasional, meskipun fakta menunjukkan bahwa tidak ada hasil atau manfaat nyata yang dapat diharapkan oleh Negara-negara dalam kerjasama dan partisipasi internasional tersebut.³¹

Kebanyakan kerjasama yang dilakukan secara bilateral seperti pertukaran pelajar, proses ekspor impor dan kunjungan kenegaraan. Ketika suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lainnya pasti memiliki kepentingan nasional masing-masing yang menjadi landasan utamanya.

4. Konsep Intelijen

Teori intelijen pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli strategi dan perang dari daratan Cina yang hidup sekitar tahun 500 SM, adalah Sun Tzu, yang

³⁰ Ibid, Hal 74.

³¹ Ibid.

meletakkan dasar-dasar ilmu intelijen dalam falsafah perang di Cina.³² Wee Chow How dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Bambang Waluyo Hidayat berjudul *Perang dan Manajemen*, menulis tentang beberapa teori dasar ilmu Intelijen yang dicetuskan oleh Sun Tzu, “...siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran ... Kenali musuh anda, kenali diri anda dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap ... Saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah ... Dalam menilai sesuatu maka ada tiga factor yang harus dianalisis yaitu factor diri, factor musuh dan factor lingkungan.”³³

Dari teori Sun Tzu itu dapat disimpulkan, bahwa apabila ingin memenangkan peperangan diperlukan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, mengenal lawan dan mengenal lingkungan.³⁴ Teori Sun Tzu akhirnya tersebar dan digunakan berbagai pihak sampai dengan dewasa ini.³⁵

³² Y. Wahyu Saronto, *INTELIJEN*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2019. Hal 27.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

Teori dasar ini terus berkembang, hingga muncul kata mata-mata atau *spionase*. Kegiatan ini merupakan kegiatan mencari data yang tidak hanya dilakukan dari luar, tetapi sudah meningkat dengan kegiatannya juga mencakup penyusupan ke dalam tubuh lawan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tugas spionase semakin menjadi dan luas, dan istilah spionase berubah menjadi intelijen.³⁶ Intelijen dalam definisinya adalah kegiatan yang di samping mencari data dan informasi, juga harus mampu memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi di masa mendatang.³⁷

Seiring berjalannya waktu, kegiatan intelijen semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Aktivitas penyadapan (*Tapping*) adalah proses pemantauan percakapan telepon, digital atau internet oleh pihak ketiga dan sering kali dilakukan secara rahasia.

D. Hipotesa

Pengaruh aksi penyadapan Australia terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia pada tahun 2009-2010 adalah bahwa hubungan bilateral antara kedua negara mengalami penurunan intensitas diplomasi.

Untuk memberikan jawaban sementara dari latar belakang yang sudah dijelaskan dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan

³⁶ Ibid, Hal 28.

³⁷ Ibid.

kerangka dasar teori sebagai acuan, dimana akan dibuktikan lebih jauh pada bagian – bagian selanjutnya pada skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa dampak aksi penyadapan oleh Intelejen Australia terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia adalah :

1. Australia menganggap Indonesia adalah ancaman bagi kestabilan negara
2. Hubungan Bilateral Australia-Indonesia terganggu.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan alasan mengapa pihak Australia melakukan aksi penyadapan kepada pemerintah Indonesia

Selain itu juga penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya Program Studi Hubungan Internasional, bahwa kebijakan yang diambil sebuah negara adalah sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional negara tersebut, serta memperkaya kajian Hubungan Internasional pada mata kuliah Pengantar Hubungan Internasional, Pengantar Kajian Strategis, Politik & Pemerintahan Australia, Isu-Isu Hubungan Internasional, dan Politik Luar Negeri Indonesia di kelas Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan

informasi terbaik untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari sebuah fenomena guna mencari kesimpulan serta mampu menciptakan pemecahan terhadap masalah tersebut. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini dimulai dengan menentukan topik, mengumpulkan data serta menganalisis data yang telah didapatkan sehingga menghasilkan suatu pemahaman tentang isu yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang ada yaitu tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi tindakan penyadapan oleh Australia berdasarkan bukti-bukti tertulis dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu berdasarkan pada data yang telah tersedia, Dalam perolehan data, penulis menggunakan studi pustaka atau *Library Research* yang mana data yang didapat berasal dari :

1. Buku – Buku
2. Jurnal
3. Majalah / Surat kabar
4. Artikel / data dari internet

G. Batasan Penelitian

Sebuah penulisan memerlukan adanya pembatasan. Pembatasan ini dimaksudkan agar pengungkapan masalah lebih fokus dan terarah. Penulisan ini mengambil jangkauan waktu tahun 2009, karena pada tahun 2009 intelejen Australia melakukan penyadapan terhadap pemerintah serta pejabat Indonesia, dan pada tahun 2010 ketegangan hubungan antara kedua negara mulai menurun.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan

BAB II merupakan bab yang berupaya menjelaskan tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan serta sejarah awal mula munculnya kerjasama dan hubungan bilateral antara pihak Australia dan Indonesia.

BAB III merupakan bab dimana penulis menjelaskan tentang dinamika dan faktor pendorong munculnya konflik yang terjadi antara Australia dan Indonesia.

BAB IV merupakan bab dimana penulis gunakan untuk memberikan analisa pembuktian hipotesa yang telah terpapar sebelumnya yaitu menyangkut tentang penyebab Australia melakukan aksi penyadapan terhadap pemerintah Indonesia.

BAB V merupakan Bab penutup, dimana penulis memaparkan Kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KEPENTINGAN NASIONAL, INTERDEPENDENSI, KERJASAMA INTERNASIONAL, INTELIJEN SERTA SEJARAH AWAL MULA HUBUNGAN BILATERAL ANTARA AUSTRALIA DAN INDONESIA.

Bab II merupakan bab dimana penulis menjelaskan tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan serta sejarah awal mula munculnya kerjasama dan hubungan bilateral antara pihak Australia dan Indonesia.

A. KEPENTINGAN NASIONAL

Dalam hubungan internasional pasti terdapat interaksi di dalamnya. Interaksi itu tidak akan bisa terjadi tanpa adanya interest atau kepentingan yang menyertainya. Aktor sebagai pelaku interaksi tentu memiliki kepentingan dalam melakukan interaksi dengan aktor lain. Setiap aktor memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda dan masing-masing

pihak tentu ingin tujuan dan kepentingannya tercapai, sehingga ada kalanya antara aktor satu dengan aktor lain saling berhubungan dengan erat dan saling bekerja sama.

Namun ada kalanya pula aktor-aktor tersebut saling bermusuhan dan terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, dalam tulisan ini Penulis akan menjelaskan mengenai apa yang disebut sebagai national interest atau yang bisa disebut sebagai kepentingan nasional.

Kepentingan nasional merupakan salah satu unsur interaksi selain aktor dan power. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan nasional itu? Definisi mengenai kepentingan nasional itu sendiri beragam dan sampai saat ini masih menjadi sebuah ambiguitas. Hal ini membuktikan bahwa konsep kepentingan nasional telah membuktikan sebagai konsep yang cukup tangguh³⁸. Konsep kepentingan nasional mengacu pada tercapainya tujuan pemerintah suatu negara di dunia internasional³⁹. Kepentingan nasional juga mengacu pada prinsip umum diplomasi⁴⁰.

Kepentingan nasional diekspresikan sebagai tujuan kekuasaan, dan terdiri dari hal-hal yang mencakup identitas fisik, identitas politik, dan identitas budaya, elemen yang cukup dasar dan cukup bertahan lama yang

³⁸ Rochester, J. Martin, 1978. "The "National Interest" and Contemporary World Politics" *The Review of Politics*, 40 (1), hal 77.

³⁹ Oppenheim, Felix E., 1987. "National Interest, Rationality, and Morality" *Political Theory*, 15 (3), hal, 370.

⁴⁰ Clinton, W. David, 1986. "The National Interest: Normative Foundations" *The Review of Politics*, 48 (4), hal, 500.

berasal dari permintaan dari banyak kelompok kepentingan dan tekanan dari aktor-aktor domestik⁴¹

Menurut Hans J. Morgenthau⁴², kepentingan nasional dibagi menjadi dua, yakni kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital adalah kepentingan yang mencakup sudut pandang kepentingan nasional yang sangat dibutuhkan sehingga tidak dapat diganggu gugat dan harus tercapai. Sedangkan kepentingan sekunder adalah kepentingan yang sewaktu-waktu dapat tumbuh menjadi kepentingan vital, sehingga masih dapat dibantah dan dinegosiasikan. Jika suatu hal termasuk dalam kepentingan sekunder, maka hal itu dapat dinegosiasikan untuk menjadi keuntungan asalkan pihak lain tidak menerapkan kebijakan ekspansionalisme⁴³.

Yang termasuk dalam kepentingan vital adalah politik, ideologi, serta pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan apabila salah satunya terganggu, maka perkembangan dan kelangsungan hidup suatu negara akan terhambat atau bahkan mengalami kemunduran. Sementara yang termasuk dalam kepentingan sekunder adalah selain tiga hal tersebut, seperti budaya.

⁴¹ Hyndman, James E, 1970/1971. "National Interest and the New Look" *International Journal*, 26 (1), hal. 7

⁴² Morgenthau, Hans J., 1962. *The Impasse of American Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press, hal. 191

⁴³ Roskin, Michael G., 1994. *National Interest: From Abstraction to Strategy*. USA: US Army War College. hal. 5

Seiring dengan berkembangnya waktu, kepentingan nasional tidak lagi dibagi berdasarkan prioritas atau urgensinya saja. Namun, kepentingan nasional dibagi lagi berdasarkan durasi, spesifikasi, dan kompatibilitas. Kepentingan berdasarkan durasi dibagi menjadi kepentingan sementara dan kepentingan permanen. Kepentingan berdasarkan spesifikasi dibagi menjadi kepentingan umum dan kepentingan khusus. Sedangkan kepentingan berdasarkan kompatibilitas dibagi menjadi kepentingan komplementer dan kepentingan konflik⁴⁴

Dalam membuat dan membentuk suatu kepentingan nasional, tentu ada motivasi dibaliknya. Motivasi ini biasanya disebut sebagai *maker motivations*. Apa sajakah *maker motivations* itu? *Maker motivations* terdiri dari ideologi, organisasi, strategi ekonomi, dan individu. Motivasi ideologi adalah motivasi yang mendasari untuk memenuhi kepentingan nasional dengan cara menanamkan atau memaksa ideologinya kepada aktor-aktor lain. Sedangkan motivasi strategi ekonomi adalah motivasi yang mendasari untuk memenuhi kepentingan nasional melalui ekonomi agar perekonomian negaranya menjadi lebih maju. Sementara motivasi organisasi adalah motivasi yang mendasari kepentingan antar aktor untuk mendapatkan kepentingan nasional melalui organisasi-organisasi yang dibentuk.

⁴⁴ Roskin, Michael G., 1994. *National Interest: From Abstraction to Strategy*. USA: US Army War College. hal. 6

Contoh paling mudah dari ketiga motivasi tersebut adalah ketika terjadi Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menanamkan pengaruhnya pada negara lain pasca Perang Dunia II. Perebutan pengaruh tersebut mencakup penanaman ideologi, pemberian bantuan ekonomi dan militer pada negara lain. Terakhir, yakni motivasi individu adalah motivasi yang mendasari untuk memenuhi kepentingan nasional yang melibatkan aktor individu. Contoh dari motivasi individu adalah ketika pemerintah menjalankan tugasnya, seperti Hitler, Stalin, Truman, serta para pemimpin lainnya.

Suatu negara tentu tidak mungkin hanya memiliki satu kepentingan nasional saja. Kepentingan nasional suatu negara tentu beragam dan mencakup banyak hal. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai dimensi kepentingan nasional. Dimensi kepentingan nasional merupakan hal dasar yang harus ada di setiap kepentingan. Menurut Donald E. Neuchterlein⁴⁵, dimensi dalam kepentingan nasional mencakup beberapa aspek seperti tatanan dunia, ekonomi, pertahanan, dan ideologi.

Menurut Michael G. Roskin terdapat dua tingkatan dalam kepentingan nasional, yang pertama bersifat tetap dan yang kedua kepentingan nasional yang bersifat aktual. Kepentingan nasional yang bersifat tetap ada adalah sebuah kepentingan negara merdeka untuk melindungi institusi-institusi

⁴⁵ Neuchterlein, Donald E., 1991. *America Recommitted: United States National Interests in a Restructured World*. Lexington: University Press of Kentucky.

negara, rakyat, dan nilai-nilai dasarnya. Sedangkan kepentingan nasional yang aktual adalah segala kepentingan yang tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan sebuah negara.

Para ahli memiliki definisi yang berbeda dalam mendefinisikan *National Interest* / Kepentingan Nasional. Hans Morgethau dalam *Politics Among Nations* menyebut kepentingan nasional sebagai suatu *Power* yang dapat diartikan sebagai pengaruh/kekuasaan/kekuatan. Berbeda dengan Morgenthau, Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional secara deskriptif dan normatif ; secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan Negara lain.

Kebijakan politik luar negeri yang dibuat oleh para pembuat keputusan sangat mengacu pada konsep kepentingan nasional yang digambarkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah hal yang paling mendasar dan yang sangat vital bagi sebuah negara untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.⁴⁶

⁴⁶ Plano Jack C. Dan Olton Roy, *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ke-3*, diterjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda, CV Putra A Bardin, Agustus 1999, Hal 7.

Dalam konsep kepentingan nasional ini ada lima kategori yang dapat dikatakan sebagai target utama yaitu :

(1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga dirinya dari berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara;

(2) *independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap negara berhak untuk merdeka dan sudah merupakan hak nya sebagai negara dan juga dimana negara tidak untuk patuh terhadap negara lain;

(3) *territorial integrity*, negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau teritorial negaranya;

(4) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain;

(5) *economic wellbeing*, atau dapat disebut kesejahteraan ekonomi, sektor ekonomi harus selalu dijamin kesetabilannya oleh pemerintah agar tercipta kesejahteraan di negara tersebut.⁴⁷

Kebutuhan suatu negara adalah hal yang paling dasar dalam menciptakan sebuah kepentingan nasional, kebutuhan disini meliputi apa – apa saja yang terjadi di dalam negara tersebut, baik itu kondisi politik, ekonomi, militer dan sosial budaya. Sebuah negara mempunyai tanggung

⁴⁷ Plano Jack C. Dan Olton Roy, Ibid. Hal 128.

jawab untuk mensejahterakan seluruh warga negara dan menyediakan segala yang dibutuhkan agar terciptanya kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

B. KONSEP INTERDEPENDENSI

Jika konsep Kepentingan Nasional maupun konsep Kerjasama merupakan konsep klasik yang eksistensinya masih relevan dalam studi Hubungan Internasional Kontemporer, Interdependensi merupakan salah satu konsep yang tergolong baru.

Dalam literature-literatur HI pada decade 1920-an hingga 1960-an konsep interdependensi jarang atau bahkan sulit ditemukan. Konsep ini memang baru mulai mewarnai analisis-analisis tentang hubungan internasional sejak dasawarsa 1970-an bersamaan dengan mulai disebut-sebutnya konsep globalisasi oleh para ahli HI.⁴⁸

Secara *leksikal*, interdependensi berarti saling ketergantungan antarnegara.⁴⁹ Saling ketergantungan timbul karena setiap Negara pasti memiliki kekurangan di tengah keunggulan komparatifnya masing-masing. Kekurangan dan keunggulan komparatif yang dimiliki setiap Negara inilah yang mendorong lahirnya kerjasama bilateral maupun multilateral.⁵⁰ Kerjasama ini pada gilirannya menyebabkan saling ketergantungan antarnegara dimana mereka saling membutuhkan satu sama lainnya.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

Luke Ashworth membedakan definisi interdependensi dalam arti sempit (*Narrow Definition*) dan dalam arti luas (*Broader Definition*), dalam arti sempit interdependensi mengacu pada hubungan-hubungan ekonomi dan social, khususnya hubungan ekonomi antar Negara.⁵¹ Adapun dalam arti luas interdependensi dapat merujuk pada sejumlah interkoneksi antar masyarakat dan antarnegara, karenanya dapat dimaknai sebagai sebuah kondisi alamiah dari semua masyarakat manusia.⁵² Sebab itu dalam arti luas, ide-ide terkait dengan interdependensi sebenarnya lebih dahulu ada dari liberalism maupun studi HI itu sendiri.⁵³ Menurut Ashworth, esensi dari konsep interdependensi adalah gagasan *natural unity of humanity*, sehingga sebagai ide interdependensi sebenarnya sudah lama berkembang dalam sejarah umat manusia.⁵⁴

Menurut Waheeda Rana, interdependensi merupakan sebuah situasi dalam politik dunia dimana semua aktor (baik Negara maupun aktor non-negara) saling ber-ketergantungan satu sama lain.⁵⁵ Graham Evans dan Jeffrey Newnham menyatakan, interdependensi dalam politik dunia menyiratkan bahwa aktor-aktor saling terkait (*interrelated*) atau saling terhubung (*interconnected*), sehingga sesuatu yang terjadi dalam suatu aktor,

⁵¹ Ibid, hal. 77.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

dalam suatu kesempatan atau dalam suatu tempat akan mempengaruhi semua aktor.⁵⁶

C. KONSEP KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama antar-negara (*International Cooperation*) telah menjadi perhatian utama sejak awal kelahiran studi HI sebagai disiplin akademis.⁵⁷ Saat itu kerja sama antarnegara dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*) atau mencegah terjadinya peperangan (*to prevent war*).⁵⁸ Kini orientasi kerjasama antarnegara telah meluas ke berbagai bidang dan menjadi kebutuhan hampir semua Negara di Dunia.⁵⁹ Semakin banyaknya interaksi antarnegara dalam bentuk kerja sama, memaksa studi HI tetap menjadikan kerja sama sebagai salah satu konsep dasar yang esensial bersama dengan sejumlah konsep lainnya.⁶⁰

Kerjasama bilateral antar negara adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak dahulu, hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bekerja sama atau beraliansi dengan negara lain, tidak peduli seberapa maju dan

⁵⁶ Ibid, Hal 78.

⁵⁷ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2017. Hal 73.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

berkembangnya negara tersebut, hal ini adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Ada sejumlah pengertian mengenai kerjasama yang bervariasi yang dibuat oleh para pemuka Hubungan Internasional. Robert Keohane menyebutkan bahwa kerja sama terjadi ketika para aktor (*states* ataupun *non states actors*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang actual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan.⁶¹ Josep Frankel mengatakan bahwa Negara-negara akan melakukan kerjasama apabila manfaat yang diperoleh mereka diperkirakan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya.⁶² Sedangkan Daniel Feri membedakan kerjasama internasional dalam 2 (dua) pendekatan dasar, yaitu *public choice approach* dan *public goods approach*; *public choice approach* adalah perilaku aktor-aktor internasional (apakah itu merepresentasikan Negara-negara, organisasi-organisasi Internasional, perusahaan-perusahaan multinasional dan lain sebagainya) dipahami sebagai usaha untuk memaksimalkan kegunaan fungsinya masing-masing dengan hambatan-hambatan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, adapun *public goods approach* merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada penjelasan tentang tipe-tipe tertentu dari kerjasama dan partisipasi yang timbul dalam hubungan internasional, meskipun fakta menunjukkan bahwa

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid, Hal 74.

tidak ada hasil atau manfaat nyata yang dapat diharapkan oleh Negara-negara dalam kerjasama dan partisipasi internasional tersebut.⁶³

Kebanyakan kerjasama yang dilakukan secara bilateral seperti pertukaran pelajar, proses ekspor impor dan kunjungan kenegaraan. Ketika suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lainnya pasti memiliki kepentingan nasional masing-masing yang menjadi landasan utamanya.

D. INTELIJEN

Teori intelijen pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli strategi dan perang dari daratan Cina yang hidup sekitar tahun 500 SM, adalah Sun Tzu, yang meletakkan dasar-dasar ilmu intelijen dalam falsafah perang di Cina.⁶⁴ Wee Chow How dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Bambang Waluyo Hidayat berjudul *Perang dan Manajemen*, menulis tentang beberapa teori dasar ilmu Intelijen yang dicetuskan oleh Sun Tzu, “...*siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran ... Kenali musuh anda, kenali diri anda dan kemenangan anda*

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Y. Wahyu Saronto, *INTELIJEN*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2019. Hal 27.

tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap ... Saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah ... Dalam menilai sesuatu maka ada tiga factor yang harus dianalisis yaitu factor diri, factor musuh dan factor lingkungan.”⁶⁵

Dari teori Sun Tzu itu dapat disimpulkan, bahwa apabila ingin memenangkan peperangan diperlukan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, mengenal lawan dan mengenal lingkungan.⁶⁶ Teori Sun Tzu akhirnya tersebar dan digunakan berbagai pihak sampai dengan dewasa ini.⁶⁷

Teori dasar ini terus berkembang, hingga muncul kata mata-mata atau *spionase*. Kegiatan ini merupakan kegiatan mencari data yang tidak hanya dilakukan dari luar, tetapi sudah meningkat dengan kegiatannya juga mencakup penyusupan ke dalam tubuh lawan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tugas spionase semakin menjadi dan luas, dan istilah spionase berubah menjadi intelijen.⁶⁸ Intelijen dalam definisinya adalah kegiatan yang di samping mencari data dan informasi, juga harus mampu memprediksi atau membuat

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid, Hal 28.

perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi di masa mendatang.⁶⁹

Seiring berjalannya waktu, kegiatan intelijen semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Aktivitas penyadapan (*Tapping*) adalah proses pemantauan percakapan telepon, digital atau internet oleh pihak ketiga dan sering kali dilakukan secara rahasia.

E. Sejarah Hubungan Bilateral antara Australia dan Indonesia

Hubungan Indonesia-Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dimulai pada tahun 1949, Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral kedua negara mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial-budaya, dan ekonomi. Namun demikian, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang harus mendorong mereka untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan.

a. Hubungan Australia dan Indonesia era Orde lama

⁶⁹ Ibid.

Hubungan Indonesia dan Australia pada era Soekarno terjadi pada rentang tahun 1945-1950 sangatlah kuat, karena Australia mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dijajah selama hampir 350 tahun oleh Belanda, pada mulanya Australia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan kolonial di Indonesia, dan berusaha memberikan simpati kepada usaha-usaha menyelesaikan persoalan kemerdekaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dan para nasionalis Indonesia. Rasa simpati tersebut pernah diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Dr. Evvat dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Dukungan Australia ini dirasakan sebagai dukungan moral yang cukup berarti bagi rakyat Indonesia yang baru merasakan arti sebuah kemerdekaan. Hal itu juga dibuktikan dengan sikap Australia dalam agresi militer Belanda baik yang pertama maupun yang kedua. Keterlibatan Australia dalam masalah Indonesia ditunjukkan dengan kebijakan negeri itu yang secara konsisten mendukung Republik Indonesia. Dukungan tampak sejak awal pemerintah Australia yang menjalankan kebijakannya yang konsisten dan radikal, bahkan orang-orang Indonesia mengakuinya dan sangat berterima kasih kepada rakyat dan pemerintah Australia.⁷⁰

⁷⁰ Hilman Adil, Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962, Jakarta: Djambatan, 1993, hlm. 30.

Pada awalnya perhatian Australia terhadap Indonesia sangat minim sekali, disebabkan karena Australia berusaha untuk mencegah keterlibatan pasukan-pasukan Australia untuk terlibat secara langsung dalam pertempuran di Jawa dan Sumatera, Australia berusaha untuk menghindari setiap keterlibatannya dalam masalah kolonial di Indonesia.⁷¹

Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, Australia tidak secara langsung mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Australia masih meragukan kemampuan kaum nasionalis Indonesia dalam membendung komunisme. Meskipun Australia meragukan kemampuan bangsa Indonesia, ideologi Partai Buruh yang anti kolonialisme semakin merasa simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Perdana Menteri Chifley dan Partai Buruh semakin yakin akan kemampuan kaum nasionalis yang mengakibatkan Australia mendukung keinginan pemerintah Indonesia agar Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia.⁷²

Australia sebenarnya dalam menanggapi masalah Indonesia dengan Belanda mencerminkan reaksi dwimuka yang berlanjut hingga Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama yaitu 21 Juli 1947. Reaksi dwimuka ini tercermin dari sikap Evvat yang pada tahun 1946 berpikir

⁷¹ Ibid., hlm. 33

⁷² Nur Azizah, Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia, dalam Prospektif 4 (4), Jakarta: Prospektif, 1992, hlm. 363.

bahwa Australia mempunyai kepentingan yang besar untuk tetap menjaga tali persahabatan dengan Belanda, sementara di lain pihak Australia akan melakukan segala hal untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia.⁷³ Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto* dalam Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa dan Sumatera.⁷⁴

Dengan disetujuinya perjanjian Linggarjati, Australia melihat persetujuan ini sebagai titik awal sebuah perkembangan bertahap menuju kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Australia adalah salah satu negara yang mengakui republik secara *de facto*, kemudian Australia menyadari bahwa telah terjadi perbedaan tafsir dari pihak Belanda. Australia melihat bahwa parlemen Belanda hanya menerima rencana persetujuan yang berdasarkan “*syarat-syarat Jonkman*”, yang artinya bahwa perjanjian yang sebenarnya tidak diceritakan secara utuh seperti aslinya. Menurut sebuah sumber, Parlemen Belanda tidak menerima hasil Perjanjian Linggarjati. Akibatnya ketegangan-ketegangan mulai muncul akibat perbedaan tafsir mengenai isi

⁷³ Hilman Adil (1993), *op.cit.*, hlm. 34.

⁷⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 136.

perjanjian tersebut. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri dan melanjutkan agresinya dengan aksi militer pada tanggal 21 Juli 1947.⁷⁵

Dalam agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, sikap Australia sendiri sangat menentang dan mengutuk aksi ini. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Australia dalam perundingan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda.⁷⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, yang pada akhirnya menggiring Belanda pada posisi diplomatik yang sulit. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik didalam PBB. Sehingga pada bulan Juli 1947, Belanda menyetujui untuk melakukan gencatan senjata dan pada bulan Oktober membentuk Komite Jasa-Jasa Baik PBB yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia dan Belgia guna membantu perundingan antara Belanda dengan Indonesia.⁷⁷

Setelah dukungan yang diberikan oleh pemerintah Australia terhadap bangsa Indonesia dalam masalah mempertahankan kemerdekaan kedaulatan bangsa Indonesia dari Belanda, kembali terjadi guncangan antara Indonesia dengan Australia dalam kaitannya dengan masalah Irian Barat. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan keduanya. New Guinea

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Hadi Soebadio, Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 162-163.

⁷⁷ ibid

Barat adalah fokus dari konflik besar pertama antar Australia dengan Indonesia. Pada tahun 1950 Pemerintahan Menzies menegaskan bahwa Australia memiliki kepentingan strategis yang penting pada masa depan administrasi New Guinea Barat. Bahkan, menurut Percy Spender Australia lebih memiliki kemiripan dengan wilayah Australia di Nieuw Guinea dan Papua.⁷⁸

Antara Indonesia dengan Australia dalam memandang wilayah Irian Barat melalui kaca mata yang berbeda. Indonesia mempunyai dua alasan yang dikemukakan untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam kedaulatannya. Sementara itu dari sudut pandang Australia adalah sebaliknya, Irian Barat mempunyai arti yang sangat penting bagi Australia. Ini disebabkan karena pulau Irian sangat strategis jika dipandang dari sudut pertahanan.⁷⁹

b. Hubungan Bilateral antara Australia dengan Indonesia di era Orde Baru

Setelah Soekarno menjalankan politik luar negeri yang militan dalam usaha kampanye pembebasan Irian Barat sehingga menyebabkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia mulai beku dan merenggang. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia yang sempat tegang tersebut

⁷⁸ Richard Chauvel, *Lingkungan Strategis Australia: Masalah Papua*, dalam *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan*, dalam *Hubungan Politik Bilateral Edisi 1*, et al., Jakarta: Granit, 2005, hlm. 62.

⁷⁹ Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 164.

melunak setelah rezim Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Menteri luar negeri Australia saat itu, Barwick mengubah haluan dengan mendukung Indonesia atas kontrol terhadap Irian Barat, karena selain itu ada kepentingan lain Australia yang melihat bahwa peluang kerjasama dengan Indonesia akan lebih menguntungkan. Indonesia adalah satu dari negara tetangga Australia yang diakui sebagai salah satu hubungan paling penting bagi Australia.

Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia, menyusul percobaan kudeta oleh PKI tahun 1965, yang dikenal dengan Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Munculnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto disambut baik oleh kalangan politisi Australia. Australia segera mengakui kepemimpinan Orde Baru, karena Indonesia memperlihatkan sikap anti-komunis yang keras dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat.⁸⁰ Beberapa pengamat mengatakan bahwa politik luar negeri Soeharto berbeda dengan Soekarno yang cenderung lebih agresif, seperti dalam kampanyenya untuk merebut Irian Barat dari Belanda, dan konfrontasinya dengan Malaysia. Sementara itu, Soeharto lebih lunak karena pemerintahannya lebih tertarik dalam membangun ekonomi Indonesia.

⁸⁰ Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 422

Menurut pandangan ini, hanya ada pengecualian yaitu dalam hal pengambilalihan Timor Timur, bekas koloni Portugis.⁸¹

Australia segera bergabung dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), sebagai kelompok negara-negara donor yang dibentuk khusus untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Australia mendukung sepenuhnya gagasan Indonesia bersama beberapa negara Asia Tenggara lainnya, ketika membentuk organisasi regional Association of South East Asia Nations (ASEAN) pada tahun 1968. Tujuan ASEAN yang berusaha menciptakan kestabilan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, berdampak positif bagi Australia. Sekurang-kurangnya hal tersebut dapat mengurangi rasa kekhawatiran terhadap isolasi negaranya, serta menjamin rasa aman yang lebih besar bagi Australia.⁸²

Sejak tahun 1967 iklim hubungan Australia-Indonesia menunjukkan perubahan yang luar biasa, perubahan itu dicerminkan dalam pernyataan laporan tahunan dari Kementerian Luar Negeri, bahwa “hubungan bilateral Australia dengan Indonesia menjadi baik”. Untuk membangun kembali kontak di bawah cara yang baik, Menteri Luar Negeri Australia membuat dua kunjungan ke Indonesia yaitu pada tahun 1966 dan 1967.

⁸¹ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Soeharto*, a. b. Nur Iman Subono. Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 67.

⁸² Zulkifli Hamid, *op. cit.*, hlm. 422-423.

Australia juga memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia. Bantuan Australia terus berlanjut dan alirannya semakin meningkat. Pada bulan Desember 1970 Menteri Luar Negeri Australia William McMahon, pada kunjungannya kepada Menteri Perdagangan Indonesia Dr. Soemitro Djojohadikusumo, mengumumkan dukungan bantuan sipil untuk proyek Indonesia yang bernilai lebih dari \$ 11 juta.

Pada bulan Juni 1968 Perdana Menteri Gorton dan istrinya, berkunjung ke Indonesia yang bermaksud untuk menunjukkan keinginan tidak hanya untuk menutup persetujuan antara dua negara tetapi juga untuk kolaborasi di wilayah Asia. Harapan dari kunjungan itu mungkin untuk hasil yang lebih besar.⁸³

Satu hal yang mendorong hubungan baik Australia dengan Indonesia adalah soal penentuan garis batas antara Irian Jaya dengan PNG. Australia sebagai Negara yang mewakili kepentingan luar negeri PNG pada tahun 1973 telah berhasil menyepakati penentuan garis batas antara Irian Jaya dengan PNG, dengan Pemerintah Indonesia. sejak itu, hubungan ekonomi dan perdagangan antara Australia dan Indonesia semakin meningkat.

Antara tahun 1972-1988, hubungan Australia dan Indonesia diwarnai oleh beberapa masalah yang mengakibatkan fluktuasinya hubungan tersebut.

⁸³ Gordon Greenwood, *Approaches to Asia: Australia Postwar Policies and Attitudes*, Sydney: McGraw-Hill, 1974, hlm. 304-305.

Soal pertama yang paling mengganggu hubungan kedua Negara bertetangga ini adalah masalah Timor Timur. Persoalan Timor Timur mewarnai kebijakan luar negeri Australia selama jabatan kedua PM Partai Buruh, Whitlam (1974-1975), selama masa koalisi Liberal-Nasional, Fraser (1975-1983), dan ketika PM Buruh, Hawke berkuasa sejak 1983. Sekalipun terjadi perdebatan seru di parlemen, Pemerintah Australia (baik Partai Buruh maupun koalisi Liberal-Nasional) memiliki pandangan yang sama mengenai masalah penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Bagi Pemerintahan Buruh maupun koalisi liberal-Nasional, prioritas tertinggi adalah memelihara hubungan persahabatan dengan Indonesia, dan tidak menghendaki adanya isu-isu yang dapat mengganggu hubungan tersebut. Segera setelah pengakuan de jure mengenai penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, pada tahun 1979 Australia memulai pembicaraan mengenai masalah Timor Gap (Pulau Timor) dengan pihak Indonesia. Pembicaraan mengenai masalah Timor Gap ini tidak selesai sampai berakhirnya pemerintahan koalisi Liberal-Nasional di bawah PM Fraser pada 1983.

Sepanjang tahun 1980-an, hubungan Australia dengan Indonesia selalu diganggu oleh persoalan Timor Timur. Sekalipun Pemerintah Australia berusaha memelihara hubungan baik dengan Indonesia, namun media Australia dan beberapa kelompok penekan tidak menghendaki persoalan

Timor Timur dihentikan. Memang, kalangan media Australia mempunyai persoalan tersendiri dengan Pemerintah Indonesia, sehubungan dengan tewasnya lima wartawan Australia ketika sedang meliput peperangan di Timor Timur pada tahun 1975. Kepentingan media Australia tampaknya bertemu dengan aspirasi dari kelompokkelompok orang Timor Timur yang bermukim di Australia, yang menentang penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Mereka menggunakan hampir seluruh pers Australia yang berpengaruh untuk melaksanakan kampanye mengancam penggabungan Timor Timur, yang diistilahkan oleh mereka sebagai “pendudukan” atau “pencaplokan”, ke dalam wilayah Indonesia. Gencarnya kecaman kelompok-kelompok tersebut dan media Australia terhadap persoalan Timor Timur, menimbulkan persepsi yang keliru dari Pemerintah Indonesia.

Sikap Pemerintah Australia yang membiarkan kecaman-kecaman pers Australia terhadap persoalan Timor Timur, dipandang Pemerintah Indonesia sebagai sikap yang tidak bersahabat, serta mendukung kepentingan kelompokkelompok anti-Indonesia. Akibatnya, hubungan kedua negara memburuk antara tahun 1980-1983. Pemerintah Indonesia mengambil langkah keras terhadap perwakilan-perwakilan media Australia di Indonesia. Beberapa surat kabar Australia dilarang beredar di Indonesia, kantor

perwakilan ABC di Jakarta ditutup, karena pembohongan visa kepala perwakilannya ditolak Pemerintah Indonesia.⁸⁴

Pada masa awal pemerintahan Indonesia oleh Soeharto Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang sulit, oleh sebab itu masa pemerintah Orde Baru mengubah arah kebijakannya dalam pemerintahan dari kebijakan politik menjadi penekanannya kepada kebijakan ekonomi. Hal ini menjadikan hubungan diplomatik Australia dengan pemerintahan Indonesia mesra lagi. Dengan diarsiteki oleh mafia-mafia Barkeley bermazhab liberal yang dikomandoi oleh Prof. Soemitro Joyohadikusumo, Indonesia berhasil maju pesat perekonomiannya. Mulai dari naiknya pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, serta berorientasi pada usaha penyelamat ekonomi nasional yang berhasil dengan gemilang. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia semakin maju, pemerintah Australia meningkatkan serta memberikan bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, bahkan bantuan militer. Indonesia mengalami stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Namun hubungan kedua negara kembali terkoyak, ketika msuknya wilayah Timor Timur dikala itu kedalam Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI) tahun 1976. Australia masih menahan diri mengingat akan dampak yang dapat ditimbulkannya, apabila Indonesia tidak menganeksasi Timor Timur.

⁸⁴ Zulkifli Hamid, *op. cit.*, hlm. 423-425.

Pemerintahan Australia dan bahkan AS tidak ada pilihan selain bersikap pura-pura setuju, pertimbangannya adalah lebih baik membiarkan berintegrasinya Timtim ke wilayah Indonesia dari pada dikemudian hari terjadi kebangkitan partai komunis di Timor-timur yang akan membahayakan kedaulatan Australia yang dinilainya jauh lebih berbahaya dari sekedar masalah Timtim.⁸⁵

Selama masa pemerintahannya, Soeharto juga berperan dan berpengaruh kuat dikalangan militer, birokrasi maupun bisnis. Hal itulah yang membuat peran sebagai presiden menjadi sentral pemerintahan. Militer menjadi sumber utama untuk menegakkan ketertiban, peraturan dan undang-undang. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan Soeharto di Indonesia. Siapapun yang menentang kebijakan Presiden maka militer akan bertindak sebagai penegak hukumnya.⁸⁶

c. Hubungan Bilateral Australia dengan Indonesia pasca Orde baru

Pada masa pemerintahan Prof. BJ Habibie, tekanan internasional sedemikian gencar, PM Australia Jhon Howard menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar diadakan jajak pendapat dan berakhir dengan

⁸⁵ *Op. Cit* http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/era-baru-kerja-sama-indonesia-australia_54f8ef1da33311d33b8b4864

⁸⁶ <https://frenndw.wordpress.com/category/politik-luar-negeri-indonesia/>

lepasnya Tim-tim pengakuan wilayah Republik Indonesia. Isu HAM kadang dimunculkan kembali yang terakhir meniupkan terorisme dengan ditunjang dana besar serta dukungan AS dan sekutunya, membuat isu baru tentang islam melalui gerakan-gerakan yang dituduhkannya sebagai gerakan terorisme, mereka dalam program jangka panjangnya menempatkan islam lebih berbahaya dari komunis.

Upaya menyudutkan pemerintah Indonesia yang dianggap dengan nafas islam semakin kencang, Australia melakukan tindakan keji dan memalukan layaknya tindakan penjahat kambuhan, memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta.⁸⁷

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid kebijakan luar negeri adalah yang paling mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak terutama dari kalangan politikus, dengan seringnya kegiatan perjalanan diplomatik yang dilakukan Abdurahman Wahid, sementara masih banyak permasalahan dalam negeri yang belum terselesaikan antara lain tuntutan demokratisasi, pengungkapan kasus pelanggaran HAM, ancaman separatisme, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

⁸⁷ *Op. Cit* http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/era-baru-kerja-sama-indonesia-australia_54f8ef1da33311d33b8b4864

Seringnya presiden Abdurahman Wahid mengadakan kunjungan diplomatik, sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan investasi asing yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia juga sebagai upaya untuk meminta dukungan negara-negara asing dalam mengenai konflik, serta mempertahankan integritas territorial Indonesia.⁸⁸

Presiden Abdurahman Wahid juga berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Australia yang renggang akibat permasalahan Timor Timur. Australia sebenarnya menjadi tempat kunjungan presiden, sehingga mendapat respon positif dari pihak Australia. Namun kunjungan yang dimaksud tertunda sampai beberapa kali sehingga meninggalkan kesan kalau Indonesia kurang memperhatikan hubungannya dengan Australia terutama dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahan Abdurahman Wahid dengan usaha membina hubungan-hubungan baru dengan berbagai negara, namun tanpa rencana yang terumuskan dengan jelas.⁸⁹ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hubungan Indonesia-Australia terus memanas sejak permasalahan Timor timur. Faktor yang menyebabkan kedua negara masih terjalin hubungan bilateral adalah kedekatan geografis dan kedekatan menjaga secara bersama keamanan daerah perbatasan.⁹⁰ Meskipun demikian,

⁸⁸ Poltak Partogi Nainggolan, "Diplomasi Ofensif Pemerintahan Wahid: Analisis Dari Perspektif Politik", Jakarta: Sekjen DPR RI, 2001. hlm.5

⁸⁹ *Ibid.* hlm.85

⁹⁰ Hariyadi, "Politik luar Negeri Indonesia Terhadap Australia Pada Masa Setahun Pemerintahan Abdurahman Wahid", Jakarta: pusat pengkajian dan pelayanan informasi DPR RI, 2001. hlm.218

peresiden Abdurahman Wahid tetap memberikan perhatian kepada Australia. Bahkan presiden Abdurahman Wahid mengemukakan gagasan untuk dialog bagi negara-negara dikawasan pasifik barat daya yang disambut baik oleh Australia.⁹¹

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2001 hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dapat dikatakan masih dingin. Hal tersebut dikarenakan adanya sejarah masa lalu di tahun 1999 yaitu ketika Australia ikut campur tangan atau intervensi dalam penyelesaian masalah Timtim. Intervensi yang dilakukan Australia tersebut tentu saja merusak hubungan bilateral dengan Indonesia apalagi dalam membela tindakannya di Timtim, Australia memposisikan diri sebagai wakil Amerika Serikat di Asia.⁹²

Pemerintah Megawati berupaya untuk membangun dan menciptakan peran masyarakat Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional, yang berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional sebagai upaya untuk memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.⁹³

⁹¹ *Ibid.*hlm.207-209

⁹² Jemadu, Aleksius. 2006. "Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia pasifik", Jurnal Luar Negeri, Volume 23 Nomor 2, BPPK Departemen Luar Negeri. Jakarta.hal.52

⁹³ <http://www.bappenas.go.id/id/>

Beberapa kerjasama yang telah dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD), Latihan Albatros (TNI AU) dan Latihan Kakadu, Latihan Cassoary, Passex dan Latihan Cakrawala baru, serta pengadaan kapal patrol dan pesawat Nomad (TNI AL). Kendati kerja sama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timor Timur tahun 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DPC kecuali program pendidikan, kedua pihak berupaya kembali memperbaiki kerja sama bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Dephan RI dan Dephan Australia 2001. Selanjutnya kerjasama pertahanan kedua negara kembali membaik, seperti dilihat dari kegiatan-kegiatan bersama yang diselenggarakan Dephan, angkatan bersenjata dan satuan angkatan bersenjata kedua negara. Selain dialog strategis pertahanan, beberapa kegiatan bersama lainnya adalah penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme dan seminar tentang pasukan penjaga perdamaian.⁹⁴

Begitu pula upaya kerjasama yang dilakukan paska bom Bali kedua negara sepakat membentuk *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* pada 16 oktober 2002. Adapun tujuan dibentuknya tim investigasi ini adalah melakukan kerjasama antara Kepolisian Indonesia (Polri) dengan pihak *Australian Federal Police* (AFP) untuk

⁹⁴ *Op.Cit.*, Aji Mimbrano. Diakses 24 maret 2018

mengidentifikasi para korban pemboman dan upaya untuk menangkap para pelaku pemboman Bali.⁹⁵ Dalam hal ini pemerintah Australia juga membentuk *Joint Counter-Terrorism Intelligence Coordination Unit* yakni dengan mengirimkan 46 petugas untuk membantu penyelidikan Kepolisian Indonesia terhadap peristiwa bom Bali serta turut membantu dalam melacak buronan teroris Malaysia Dr. Azhari dan Noordin M. Top sebagai toko sentral dari berbagai pemboman di Indonesia terutama peristiwa bom Bali. Upaya lainnya juga dilakukan adalah kembali mengadakan *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorisme* di Nusa Dua Bali pada 4-5 Februari 2004 yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dan Australia dengan beberapa negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat upaya regional dalam melawan terorisme, khususnya dalam area penegakan hukum berbagai informasi dan kerangka hukum.⁹⁶

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memprioritaskan isu terorisme dan juga lebih meningkatkan kerjasama kontra-terorisme terutama dengan Australia yang dilakukan dengan membuat kebijakan kontra-terorisme baru untuk menjaga keamanan nasional Indonesia. Dengan adanya kebijakan kontra-terorisme yang baru antara Indonesia dengan Australia diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya. Berikut ini beberapa kerjasama yang telah

⁹⁵ <http://foreignminister.gov.au/Pages/default.aspx>

⁹⁶ Wise, M. William.2005. Indonesia's War On Terror. United State-Indonesia Society.Hal.76

dilakukan oleh Indonesia dan Australia selama masa pemerintahan SBY seperti yang dilakukan pada Februari 2005 bersama dengan pemerintah Australia dan Indonesia membangun suatu program bantuan untuk meningkatkan pengembangan intelijen serta kemampuan dan pengawasan untuk menjaga keamanan pelabuhan Indonesia.

Selain itu mulai terdapat persetujuan tentang pengaturam dalam kerjasama Indonesia-Australia yang berupa *Aviation Security Capacity Building Project* yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2005. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuknya para pelaku teroris ke Indonesia melalui jalur laut maupun daratan yang melewati perbatasan. Begitu juga dengan adanya pertemuan bilateral yang dilakukan pada 3-6 April 2005.⁹⁷

Dalam perjalanannya, hubungan kedua negara telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di kedua negara, kawasan, dan lingkungan global. Lebih dari satu dekade terakhir hubungan kedua negara berkembang menjadi lebih kuat dan komprehensif. Untuk memperkuat landasan kerjasama dan kemitraan komprehensif, kedua negara telah memiliki *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia (2005)* dan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for*

⁹⁷ Wise, M. William. 2005. Indonesia's war On Terror. United State-Indonesia Society. hal44&74

Security Cooperation atau Traktat Lombok (2006).⁹⁸ Australia dan Indonesia menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat hubungan bilateral di Agustus 2014 dengan menandatangani pemahaman bersama dalam pelaksanaan Perjanjian Lombok. Kesepahaman bersama memberikan pendekatan sepakat untuk meningkatkan kerjasama intelijen antara badan-badan Australia dan Indonesia.⁹⁹

Penandatanganan kerjasama keamanan Indonesia-Australia yang mengambil tempat di pulau Lombok merupakan pertanda seolah ingin menyampaikan bahwa perairan Selat Lombok sangat vital dalam keamanan nasional Australia. Perjanjian kerjasama keamanan yang ditandatangani Menteri Luar negeri kedua negara mengatur kerjasama pada 10 bidang. Kesepuluh bidang itu meliputi pertahanan, keamanan maritim, intelijen, kontra terorisme, pencegahan proliferasi senjata pemusnah missal, tanggap darurat bencana alam, pengakuan hukum, keselamatan dan keamanan penerbangan, kerjasama di dalam organisasi internasional dan kerjasama antar masyarakat.¹⁰⁰

⁹⁸ (<http://www.kemlu.go.id/canberra/id/Pages/Australia.aspx>), diakses 25 maret 2018

⁹⁹ *Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade*, (<http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx>), diakses 25 maret 2018

¹⁰⁰ *Op.Cit.*, Aji Mimbarno. Diakses 25 maret 2018

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Bab III merupakan bab dimana penulis menjelaskan tentang dinamika dan faktor pendorong munculnya konflik yang terjadi antara Australia dan Indonesia.

A. Hubungan Indonesia - Australia Pada Masa Kemerdekaan

Australia telah menjalin hubungan dengan Indonesia sejak masa menjelang kemerdekaan Indonesia 1945. Pada Sikap Australia yang bersimpati dengan Indonesia ditandai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Australia, Dr. Herbert Vere Evatt, pada kunjungannya ke Amerika Serikat yang menyarankan agar “Hindia Belanda dan Australia dapat menjadi mitra erat dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.”¹⁰¹

Indonesia mendapat dukungan dari partai yang saat itu menguasai pemerintahan yang ada di Australia, yaitu Partai Buruh mengenai pertikaian antara Belanda-Indonesia. Partai Buruh menginginkan Belanda harus lebih liberal dan realistis dalam menyesuaikan tuntutan absah rakyat Indonesia.

Pada prinsipnya, Partai Buruh tidak ingin menjadi partai yang mendukung kolonialisme yang bersifat menindas atau menekan Komunisme di Asia Tenggara. Dengan menerima, mengakrabi dan mendukung nasionalisme Indonesia, Partai Buruh percaya bahwa sikap ini bisa melindungi keamanan Australia dan membantu stabilitas kawasan Asia Tenggara.

¹⁰¹ Susan Critchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia dan Strategi Keamanan* (Terjemahan Sugiarta Sriwibawa; Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1995), hlm. 26.

Usaha-usaha Pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 dan 1949 benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan oleh Pemerintah Australia yang waktu itu dikuasai Partai Buruh. Kapal-kapal Belanda tidak diberi bahan bakar, dan para pekerja pelabuhan tidak mau menaikkan muatan bahan persediaan ke atas kapal Belanda.¹⁰²

Australia berperan penting dalam membantu para pejuang nasionalis Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Hal ini merupakan wujud perhatian politik luar negeri Australia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Chifley, dan antusiasme Menteri Luar Negeri-nya Dr. H.V. Evatt. Australia – yang ketika itu menjabat sebagai Dewan Keamanan PBB – mengecam aksi militer Belanda pada 20 Juli 1947¹⁰³. Wakil-wakil Australia di PBB mengusulkan dan mengajukan negaranya untuk bertindak sebagai arbitrase di dalam persoalan Indonesia-Belanda. Usul itu ditolak, namun pada Oktober 1947 Australia dipilih oleh Indonesia menjadi anggota Komisi Jasa-Jasa Baik (*Good Offices Committee*) mewakili Indonesia yang diusahakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹⁰⁴.

Australia bersikap sangat kritis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui keanggotaannya dalam *United Nations Committee on Indonesia*, Australia mendesak Amerika Serikat agar menggunakan pengaruhnya untuk

¹⁰² <http://www.dfat.gov.au/aia/publications/babl1/index.html> diunduh tanggal 9 Oktober 2017 pukul 08:15 WIB

¹⁰³ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 420

¹⁰⁴ Critchley, *Op. Cit.*, hlm. 13

mendesak Belanda segera merundingkan penyelesaian tersebut. Pada akhir Januari 1949 Dewan Keamanan PBB menuntut pembebasan kabinet Republik, pembentukan suatu pemerintah sementara, dan penyerahan kedaulatan segera sebelum tanggal 1 Juli 1950¹⁰⁵. Akhirnya kedaulatan Indonesia diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Australia juga mensponsori masuknya Indonesia ke PBB pada tahun 1950. Hal inilah yang menyatukan hubungan kedua negara dan menempatkan Australia sebagai “kawan” Indonesia.

B. Masalah Irian Barat

Pada tahun 1950, pemerintahan Menzies menegaskan bahwa Australia memiliki kepentingan strategis yang penting pada masa depan administrasi Irian Barat. Menurut Percy Spender, yang dikemudian hari menjadi Menlu Australia, wilayah tersebut tidak ikut membentuk wilayah Indonesia, tetapi lebih memiliki kemiripan dengan wilayah Australia di *New Guinea* dan Papua.

Spender menyadari Australia memiliki kepentingan dalam stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Masuknya Irian Barat ke dalam Indonesia tidak akan menambah stabilitas regional, tetapi merupakan bentuk kelemahan dalam perencanaan strategis Asia Tenggara. Australia menginginkan Belanda mengambil kembali kedaulatannya atas daerah tersebut dan menawarkan bantuan ekonomi,

¹⁰⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Terjemahan Drs. Dharmono Hardjowidjono; Cetakan ke-9; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 349

administrasi, dan pertahanan sehingga Belanda tidak menyerah pada tuntutan Indonesia¹⁰⁶.

Di mata Indonesia, Australia yang tadinya menjadi kawan berubah menjadi pendukung oposisinya yang paling jelas, Belanda. Indonesia-pun mengambil jalan keras dalam masalah Irian Barat, di mana kesatuan-kesatuan militer diturunkan untuk menguasai Irian Barat. Sementara perjuangan diplomasi dilakukan oleh Soekarno dengan menggalang dukungan dari negara dunia ketiga. Sikap agresif Soekarno semakin membuat Australia yakin mengenai pentingnya Irian Barat berada dalam kekuasaan Belanda. Australia dibawah pemerintahan Menzies Australia melihat tindakan Soekarno sebagai ekspansi teritori yang dikawatirkan menjadi ancaman keamanan Australia¹⁰⁷. Keyakinan itu seolah dipertegas dengan sikap Soekarno yang membina hubungan persahabatan dengan negara-negara komunis, seperti Vietnam Utara, Korea Utara, RRC, dan Uni Soviet. Dikhawatirkan bahwa integrasi daerah jajahan Belanda yang dulu disebut Nugini Barat itu dengan Indonesia akan memperluas pengaruh komunisme¹⁰⁸.

Pada tahun 1961, sikap Australia terhadap Indonesia perlahan-lahan melunak. Bila terjadi perjanjian yang damai dan sah antara Indonesia dengan Belanda tentang

¹⁰⁶ Richard Chauvel et.al., *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, (Jakarta: Granit, 2005) hlm. 62

¹⁰⁷ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, [terj.], (Jakarta: LP3ES, 1998) hlm. 115

¹⁰⁸ <http://www.dfat.gov.au/aia/publications/bab11/index.html> diunduh tanggal 9 Oktober 2017 pukul 08:15 WIB

masa depan Irian Barat, maka Australia akan menyetujui keputusan tersebut. Kemudian pada tahun itu pula Menteri Luar Negeri Australia, Barwick, menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Australia untuk takut terhadap klaim Indonesia atas Irian Barat.

Barwick juga mengubah haluan Australia yang kemudian mendukung Indonesia asal semua berjalan dengan damai. Menzies sepakat dengan Barwick dan setuju atas kontrol Indonesia terhadap Irian Barat walaupun banyak dikritik oleh opini publik. Pertimbangan Australia mendukung Indonesia adalah karena kerjasama dengan Indonesia akan lebih menguntungkan dari pada dengan Belanda, Australia ingin menghindari peperangan dengan negara tetangga terdekat dan mispersepsi tentang Indonesia.

Akhirnya memang Australia tidak bisa berbuat apa-apa setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia pada tahun 1962 dan menjadi bagian dari Indonesia melalui Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah supervisi PBB pada tahun 1969.

C. Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Dalam periode tahun 1963-65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang berlainan mengenai pembentukan negara Malaysia. Daerah bekas jajahan Inggris ini meliputi Malaya,

Sarawak, Sabah, dan Singapura. Namun, pada tahun 1965 Singapura keluar dari Malaysia.

Sebagai sebuah negara Persemakmuran, Malaysia mempunyai kaitan yang penting dalam hubungan militer dan pendidikan dengan Australia. Angkatan Bersenjata Australia sebelumnya telah membantu tentara Malaysia dan Inggris dalam perjuangannya melawan gerilya komunis yang aktif di Malaysia. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno waktu itu menyebut Malaysia sebagai rezim ciptaan neo-kolonialis dan menganggapnya ancaman bagi Indonesia¹⁰⁹.

Australia waktu itu terus mendukung Malaysia dan semakin mengkhawatirkan perkembangan komunisme di Indonesia. Australia juga mengkhawatirkan adanya pendekatan konfrontasi yang digunakan Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Akhirnya tentara Australia, yang mendukung Pemerintah Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan tentara Indonesia di perbatasan Sarawak-Borneo (sekarang Kalimantan).

Masalah tersebut di atas terpecahkan menyusul dengan adanya insiden Gestapu yang gagal di Indonesia pada tahun 1965, dan dengan diangkatnya President Soeharto sebagai pemimpin. Sesudah tahun 1965 hubungan antara Australia-Indonesia mulai berkembang lagi, dan menjelang tahun 1967 Australia memberikan

¹⁰⁹ <http://www.dfat.gov.au/aia/publications/bab11/index.html> diunduh tanggal 9 Oktober 2010 pukul 08:15 WIB

dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia dengan bergabung dalam *Inter-Governmental Group on Indonesia*.

D. Integrasi Timor Timur 1975 dan Dampaknya pada Hubungan Indonesia-Australia

Antara tahun 1972-1988, hubungan Indonesia-Australia kembali merenggang karena adanya sengketa Timor Timur. Setelah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, terjadi perselisihan di antara berbagai kelompok politik di Timor Timur. Perdana Menteri Australia, Whitlam, telah membicarakan masalah ini dengan Presiden Soeharto pada September 1974¹¹⁰. Menurutnya Timor Timur tidak akan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri, yang menjadi ancaman bagi kestabilan kawasan tersebut. Namun, ia juga menghendaki agar rakyat Timor Timur diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan masa depannya sendiri.

Akan tetapi pemerintah Indonesia melihat kemungkinan timbulnya gangguan terhadap kestabilan dan keamanan apabila Timor Timur menjadi negara merdeka. Pemerintah Indonesia lalu memerintahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia pada Juli 1976¹¹¹. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Australia memandang hubungan Indonesia-Timor Timur tak ubahnya

¹¹⁰ Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 423

¹¹¹ Hamid, *Ibid.*, hlm. 424

seperti Belanda-Indonesia¹¹². Indonesia dianggap telah “menduduki” atau “mencaplok” Timor Timur secara sepihak. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia yang sedang meliput Operasi Seroja di Timor Timur pada 16 Oktober 1975 (peristiwa *Balibo Five*) yang diduga dibunuh oleh tentara Indonesia telah menjadi kenangan buruk bagi masyarakat Australia dan media¹¹³. Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979.

E. Reformasi dan Kemerdekaan Timor Timur

Konflik di Timor Timur telah mempunyai implikasi untuk gengsi dan kedudukan Indonesia di dunia internasional, dan terutama untuk hubungan Indonesia-Australia. Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 dan munculnya gerakan reformasi, rakyat Timor Timur pun mulai tergerak untuk menuntut haknya menentukan masa depannya sendiri.

Pada tanggal 27 Januari 1999, Presiden Habibie mengumumkan bahwa masyarakat Timor Timur akan diberi kesempatan untuk melakukan pemungutan suara mengenai suatu paket otonomi¹¹⁴.

Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Beberapa pengamat politik pada saat itu menganggap keputusan Habibie didasarkan kepada anggapan bahwa

¹¹² Chauvel, *Op. Cit.*, hlm. 63

¹¹³ Chris Manning, Peter van Diermen (ed.), *Indonesia Di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, (Yogyakarta: LkiS, 2000) hlm. 111

¹¹⁴ Manning, *Ibid.*, hlm. 116

Indonesia hanya mendapat keuntungan yang kecil dari usaha mempertahankan Timor Timur. Jika dipertahankan Indonesia akan terbebani untuk meneruskan pendanaan bagi sebuah propinsi yang belum dapat mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, kelihatannya lebih baik jika “duri dalam daging” itu dicungkil keluar sekaligus¹¹⁵.

Pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Pemungutan suara itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1999, dan akan didahului dengan kampanye informasi oleh PBB dan disusul dengan kampanye politik selama dua minggu. Proses itu akan dilaksanakan oleh Misi Bantuan PBB di Timor Timur (UNAMET).

Tanggal 21 Juni 1999, Sekretaris jenderal PBB menunda pemungutan suara dari tanggal 8 Agustus menjadi tanggal 21 atau 22 Agustus dengan alasan kesulitan logistik dan kekhawatiran tentang keamanan. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%).

F. Bom Bali dan Terorisme

Isu terhadap terorisme pertama kali mencuat ketika runtuhnya gedung World Trade Center dan Pentagon di New York Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal

¹¹⁵ Manning, *Ibid.*, hlm. 117

11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemudian secara gencar mengeluarkan doktrin “global war on terrorism” dalam skala global untuk memerangi ancaman terorisme internasional. Doktrin tersebut kemudian menyudutkan jaringan terorisme internasional Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi WTC. Respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal¹¹⁶.

Munculnya doktrin global war on terrorism dari AS, tentunya sangat berpengaruh bagi Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, terlebihnya lagi target terbesar dari doktrin tersebut adalah kelompok Islam fundamentalis. Tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, munculnya doktrin tersebut juga berpengaruh terhadap negara-negara sekutu Amerika terutama Australia untuk turut berperan aktif dalam melawan terorisme internasional. Seperti halnya di Amerika Serikat, frekuensi serangan teror di Indonesia cukup tinggi karena dampak dari serangan WTC. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran aksi terorisme dan juga dilihat sebagai salah satu negara asal beberapa pelaku terorisme. Beberapa peristiwa yang terkait dengan aksi terorisme di Indonesia salah satunya yaitu peristiwa bom Bali 1. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Paddy’s Cafe & Sari

¹¹⁶ Sukma, Rizal. 2003. Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS, dan Implikasi Global. Denpasar: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.

Club, jalan Legian Kuta Bali, merupakan peristiwa pemboman terbesar kedua pasca WTC. Peristiwa tersebut menelan korban 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka yang secara mayoritas para korbanya merupakan para turis asing yang berasal dari berbagai negara yaitu Indonesia, Amerika, Asia, Eropa dan terutama dari Australia. Peristiwa tersebut telah menyadarkan dunia internasional bahwa jaringan terorisme kini telah berkembang dan tumbuh di Indonesia¹¹⁷.

Peristiwa bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 merupakan sebuah tragedi yang sangat mengejutkan dunia internasional terutama Indonesia, karena pemboman tersebut terjadi di Indonesia. Peristiwa pemboman ini memperlihatkan akan adanya perkembangan terorisme internasional. Dilihat dari tempat dan korban pemboman, sasaran dari para teroris tidak hanya tertuju pada warga negara Indonesia melainkan sasaran bom tersebut adalah warga negara asing, terutama Australia.

Banyaknya korban yang merupakan warga negara Australia membuat pemerintah Australia mendesak pemerintah Indonesia agar bertanggungjawab dan menemukan pelaku pemboman tersebut. Kebijakan yang langsung diambil pemerintah Australia sesaat setelah terjadinya pemboman tersebut adalah dengan mengeluarkan travel warning kepada warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia¹¹⁸.

¹¹⁷ Muh. Jusrianto. 2013. Isu Terorisme: Optimalisasi Kerjasama Keamanan Australia - Indonesia

¹¹⁸ <http://repository.unikom.ac.id/repo/sector/perpus/view/jbptunikompp-gdl-deniyunard-19669.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 20:41

Maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2002-2005 telah mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. Aksi terorisme kini dipandang tidak hanya sebagai masalah internal suatu negara namun melainkan juga sebagai masalah bagi dunia internasional yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa WTC dan juga bom Bali 1 beserta rentetan peristiwa terorisme yang kerap melanda Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya kelompok Jemaah Islamiah dan memiliki hubungan dengan jaringan Al- Qaeda. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim terbesar di dunia turut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai sarang dari jaringan terorisme internasional. Dampak dari peristiwa tersebut telah menimbulkan suasana terror dan rasa takut yang meluas yang tentunya akan merubah sikap dan kebijakan yang diambil Australia terhadap Indonesia¹¹⁹.

Setelah kejadian itu, Indonesia, didorong oleh Australia dan Amerika Serikat, mulai gencar menyelidiki siapa dalang dibalik peristiwa Bom Bali. Australia yang warga negaranya turut menjadi korban, juga ikut melakukan penyelidikan di Indonesia yang terkadang terlalu mengintervensi Indonesia. Ahli dari Australia dan AS dikirim ke Indonesia untuk membantu investigasi, mulai dari mengidentifikasi

¹¹⁹ Purwasari, Diene. 2007. Hubungan Indonesia-Australia PascaBom Bali 1 (Di Lihat Dari Sudut Pandang Indonesia). Yogyakarta : UPN Veteran.

korban hingga melacak aliran uang¹²⁰. Tak hanya sampai di situ, pemerintah Australia juga melakukan tindakan-tindakan antiteroris di negaranya dengan melakukan penggrebegan ataupun sweeping terhadap warga Indonesia di Australia karena diduga terkait dengan jaringan teroris¹²¹.

Dari hal-hal tersebut, hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia justru semakin buruk. Melihat hal ini kedua negara lalu berinisiatif untuk membuat sebuah kerjasama resmi dalam bidang pertahanan demi kepentingan kedua belah pihak.

Hubungan kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia pasca peristiwa bom Bali I diawali dengan adanya kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) pada 7 November 2002. Berdasarkan MoU yang telah disepakati, terlihat bahwa adanya keinginan kedua negara untuk mengadakan kerjasama dalam mencegah tindak kejahatan terorisme.

MoU tersebut juga merupakan kerangka rencana kerjasama Indonesia-Australia dalam sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan para agen penegak hukum dari kedua negara. Dalam MoU tersebut, kerangka kerjasama Indonesia-Australia dalam menangani isu terorisme meliputi :

1. Pertukaran arus informasi badan intelejen masing-masing negara
2. Perluasan jaringan kerjasama

¹²⁰ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=5982> diakses pada tanggal 9 Oktober 2010 pukul 20:43

¹²¹ <http://www.gatra.com/2002-11-14/artikel.php?id=22436> diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 20:40

3. Mengadakan program pelatihan serta pendidikan anti-terorisme

MoU ini merupakan landasan Indonesia dan Australia dalam menerapkan kerjasama keamanan kedua negara dalam menghadapi isu terorisme. Kerangka kerjasama yang telah dibuat, juga membutuhkan komitmen dan partisipasi seluruh lembaga pemerintah kedua negara, seperti badan imigrasi dan bea cukai yang dapat berfungsi untuk mengawasi arus kegiatan lintas-batas negara antara Indonesia dan Australia.

Implementasi dari MoU ini adalah Indonesia dan Australia kerap kali mengadakan latihan bersama dalam menangani terorisme, seperti yang dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan *Australlian Special Air Service (SAS)* pada tanggal 28 September 2010. Latihan yang diberi nama Dawn Komodo-10 ini dilakukan untuk menerapkan teknik dan taktik dalam membebaskan sandera¹²².

G. Indonesia-Australia Saat Ini

Hubungan Indonesia dan Australia pada saat ini bisa dikatakan dalam keadaan baik. Berbagai bentuk bantuan dan kerjasama banyak dilakukan. Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Dengan adanya perdagangan 2 arah senilai 10,3 miliar dollar AS selama 2007-2008, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-4 Australia di ASEAN dan mitra dagang

¹²² <http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7153015.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2010 pada pukul 06:17 WIB

terbesar ke-13 dari seluruh mitra dagang Australia. Investasi Australia di Indonesia berkembang pesat dan mencapai 3,4 miliar dollar AS pada akhir 2007¹²³.

Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2001–02 Australia akan menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain sejumlah 1,725 juta dolar Australia. Indonesia akan menerima kira-kira 7,04% dari dana bantuan ini, yang berjumlah 121,5 juta dolar, melalui Program Kerjasama Pembangunan¹²⁴.

Tidak hanya itu, pada tahun 2009 Australia telah memastikan komitmen bantuan bagi Indonesia senilai 40 juta dollar Australia lewat International Forest Carbon Initiative atau Prakarsa Karbon Hutan Internasional. Bantuan tersebut merupakan bagian dari bantuan senilai 200 juta dollar AS dan mencakup Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan yang ditujukan guna memangkas emisi gas rumah kaca akibat penggundulan hutan¹²⁵.

¹²³<http://internasional.kompas.com/read/2009/02/19/15002251/Australia.Serius.Bentuk.Perdagangan.Bebas.dengan.Indonesia> diakses pada tanggal 9 Oktober 2010 pukul 07:41 WIB

¹²⁴ <http://www.dfat.gov.au/aia/publications/bab11/index.html> diunduh tanggal 9 Oktober 2010 pukul 08:15 WIB

¹²⁵<http://internasional.kompas.com/read/2009/02/21/08251943/Australia.Turut.Atasi.Penebangan.Hutan.di.Indonesia> diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 07:47 WIB

Australia merupakan negara pemberi donor terbesar kelima kepada Indonesia. Australia telah menyumbang 1.5% sampai 6% dana bantuan luar negeri Indonesia. Dalam sektor pendidikan di Indonesia, Australia menyediakan program beasiswa yang terbesar.

BAB IV

PENYEBAB AKSI PENYADAPAN AUSTRALIA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA

Bab IV merupakan bab dimana penulis gunakan untuk memberikan analisa pembuktian hipotesa yang telah terpapar sebelumnya yaitu menyangkut tentang penyebab Australia melakukan aksi penyadapan terhadap pemerintah Indonesia.

Penulis akan menjelaskan secara dalam apa yang menjadi faktor pendorong Australia melakukan penyadapan kepada pemerintah Indonesia, Konsep kepentingan nasional yang digambarkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton menjadi sumber tunggal yang digunakan penulis untuk mengupas tuntas tema tersebut serta pengaruhnya terhadap hubungan Bilateral Indonesia-Australia.

kepentingan nasional adalah hal yang paling mendasar dan yang sangat vital bagi sebuah negara untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹²⁶

Dalam konsep kepentingan nasional ini ada lima kategori yang dapat dikatakan sebagai target utama yaitu :

(1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga dirinya dari berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara;

(2) *independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap negara berhak untuk merdeka dan sudah merupakan hak nya sebagai negara dan juga dimana negara tidak untuk patuh terhadap negara lain;

(3) *territorial integrity*, negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau teritorial negaranya;

¹²⁶ Plano Jack C. Dan Olton Roy, *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ke-3*, diterjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda, CV Putra A Bardin, Agustus 1999, Hal 7.

(4) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain;

(5) *economic wellbeing*, atau dapat disebut kesejahteraan ekonomi, sektor ekonomi harus selalu dijamin kesetabilannya oleh pemerintah agar tercipta kesejahteraan di negara tersebut.¹²⁷

Kebutuhan suatu negara adalah hal yang paling dasar dalam menciptakan sebuah kepentingan nasional, kebutuhan disini meliputi apa – apa saja yang terjadi di dalam negara tersebut, baik itu kondisi politik, ekonomi, militer dan sosial budaya. Sebuah negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan seluruh warga negara dan menyediakan segala yang dibutuhkan agar terciptanya kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Kasus penyadapan oleh intelejen Australia kepada pemerintah Indonesia sudah pasti memiliki motif kepentingan nasional yang kuat, mengingat Australia telah mengetahui bagaimana resiko yang dapat mereka terima jika Indonesia mengetahui aksi mereka ini. Secara garis besar Australia adalah sekutu dari Amerika Serikat yang sudah pasti menitipkan amanah kepada mereka untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara – negara di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia.

¹²⁷ Plano Jack C. Dan Olton Roy, Ibid. Hal 128.

Dari tinjauan teori, kepustakaan maupun informasi-informasi yang telah penulis tulis di bab-bab sebelumnya tentang aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Pemerintah Indonesia, penulis menekankan bahwa yang melatar-belakangi aktivitas penyadapan ini adalah interdependensi Negara Australia terhadap Negara Indonesia. Penulis akan menjabarkan hasil olahan data yang didapat menjadi 2 (dua bagian), pertama adalah alasan penyadapan, dan kedua adalah pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia.

A. Penyebab terjadinya aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pemerintah Indonesia

1. Interdependensi Australia terhadap Indonesia adalah alasan utama penyadapan Australia terhadap pemerintah Indonesia.

a. Islam, Terorisme dan hubungannya dengan Amerika Serikat.

Pada bab sebelumnya, penulis mencantumkan beberapa subjek mengenai dinamika hubungan antara Indonesia dan Australia, salah satu diantaranya adalah pasca tragedi terorisme 9/11 di Amerika, yang mana pasca tragedi tersebut telah menimbulkan banyak persepsi negatif terhadap agama Islam. Doktrin “*Global War on Terrorism*” dan *Islamophobia* tengah menyebar ke

seluruh belahan dunia. Tidak sedikit tindakan terorisme dimanapun selalu dikaitkan dengan agama Islam, bahkan sampai dengan sekarang ini. Satu tahun setelahnya muncul tindakan terorisme di Bali, Indonesia, atau biasa kita kenal dengan tragedy Bom Bali 1, dimana korbannya kebanyakan adalah turis dari Australia. Kejadian ini merupakan ‘tamparan keras’ bagi hubungan antara Australia dan Indonesia, yang mana penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan populasinya terbesar di Dunia. Artinya bagi penulis sangat masuk akal ketika proses intelijen dalam bentuk penyadapan ini dilakukan oleh Australia yang notabene memiliki kedekatan ‘khusus’ dengan Amerika dalam rangka mencari lebih dalam informasi tentang hubungan antara Islam dan Pemerintah Indonesia. *Prof. Dr. Salim Said, MA*, seorang pengamat militer yang juga mantan Duta Besar RI untuk Republik Ceko, dalam wawancaranya dengan JPNN (JPNN 2013) mengatakan,

“Saya curiga, ini bagian dari penyadapan global yang dilakukan Amerika. Australia itu bekerja untuk Amerika. Amerika ingin tahu banyak tentang Indonesia dan Australia punya alat sadap yang canggih untuk meng-cover Indonesia. Ingat, Australia itu pembantu Amerika untuk wilayah Asia Tenggara. Amerika senang atas kesediaan Australia menjadi pembantunya.”¹²⁸

Komentar ahli/pengamat diatas menguatkan argumentasi penulis terhadap hasil riset ini.

¹²⁸ Wawancara Prof. Dr. Salim Said, MA., dengan JPNN, 2013.

b. Penyadapan dilakukan terhadap pejabat pemerintah dibidang Ekonomi, Pertahanan, Hukum dan HAM, Luar Negeri sampai dengan Ibu Ani Yudhoyono. Hal ini memperkuat sinyal alasan penyadapan adalah bahwa Australia memiliki perhatian khusus di sektor-sektor vital Negara. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Indonesia? Penulis berpandangan bahwa karena Negara ini memiliki potensi yang tinggi untuk sumberdaya alam dan manusia. Dengan kata lain, kejadian penyadapan ini memberikan gambaran besar bahwa keberadaan Indonesia perlu diwaspadai dan juga dikaji apakah akan menguntungkan atau justru merugikan mereka.

B. Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Pasca kejadian penyadapan Australia terhadap beberapa pejabat pemerintah Indonesia termasuk Presiden beserta istrinya, pemerintah langsung mengambil 3 langkah untuk merespon kejadian ini. *Pertama*, pemerintah lewat Kementrian Luar Negeri saat itu memanggil perwakilan Australia, dalam hal ini Duta Besar Australia untuk Indonesia, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kejadian penyadapan tersebut. *Kedua*, pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, untuk dimintai keterangan maupun informasi yang didapat selama mengemban tugas disana. *Ketiga*, pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia, yang nantinya Indonesia akan lebih membatasi dan menjaga jarak dengan Australia yang selama ini dianggap sebagai Negara tetangga dan sahabat.

Menurut penulis, langkah yang diambil oleh pemerintah pada saat itu cukup tepat. Artinya pemerintah tidak langsung tergesa-gesa dengan memutus hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia, bahkan bagi penulis terlalu naif apabila keputusan yang diambil adalah dengan memutus hubungan bilateral dengan Australia, mengingat Indonesia dan Australia telah melalui sejarah dan hubungan persahabatan antar Negara yang panjang.

Pertama, dengan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia untuk dimintai keterangan lebih lanjut, artinya pemerintah Indonesia merespon kejadian penyadapan ini dengan bijak dan sesuai birokrasi kenegaraan. Penulis kesulitan mencari informasi untuk hasil dari pemanggilan Duta Besar Australia untuk Indonesia oleh pemerintah.

Kedua, pemanggilan pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia merupakan sebuah pesan tersirat dan protes dari pemerintah Indonesia untuk Australia. Hal ini sangat baik dilakukan untuk menjaga martabat dan kehormatan suatu Negara.

Ketiga, mengkaji ulang hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia merupakan langkah yang bijak agar Indonesia selalu memberikan perhatian untuk pihak luar dalam rangka menjaga kedaulatan Negara.

Pasca aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa Pejabat Indonesia, Pemerintah mengambil langkah dengan mengumumkan keputusan untuk menurunkan level hubungan diplomatik dengan negara

Australia. Langkah demikian termasuk menghentikan kerjasama di bidang latihan militer maupun sampai dengan penampungan pengungsi.

BAB V

KESIMPULAN

Bab V merupakan Bab penutup, dimana penulis memaparkan Kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya.

Kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelejen Australia terhadap petinggi negara Indonesia pada bulan Agustus 2009 lalu dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Australia ingin mengetahui keseriusan Indonesia dalam menyikapi hubungan bilateral kedua negara. Dikarenakan tingkat interdependensi Australia terhadap Indonesia tinggi,

namun tidak sebaliknya, Australia takut untuk “kehilangan” Indonesia. Indonesia menjadi negara yang begitu penting bagi Australia dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan keamanan. Maka dari itu Australia menargetkan untuk menyadap Sri Mulyani Indrawati yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia. Di bidang keamanan, bagi Australia, Indonesia adalah *buffer-state* yang menahan ancaman dari utara jika ada yang ingin menyerang Australia.

Selain itu, keikutsertaan Amerika Serikat yang “membonceng” Australia dalam penyadapan ini juga benar. Kedekatan hubungan dengan Australia membuat AS dengan mudah mengakses informasi dari Australia dalam melakukan penyadapan terhadap Indonesia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya demi mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Pasifik. Pendapat ini telah didukung oleh beberapa fakta tentang kepentingan AS di Asia Pasifik dan beberapa pendapat ahli. Namun mengenai mengapa Australia menargetkan mantan Menteri Koor. Hukum dan HAM belum bisa dikatakan sebagai latar belakang lain karena penulis belum bisa memberikan bukti yang cukup kredibel.

Dalam dunia hubungan Internasional, tidak bisa kita pungkiri bahwa kegiatan intelijen dalam bentuk penyadapan adalah hal yang lumrah terjadi, tetapi yang menjadi titik fokusnya adalah apakah informasi tersebut digunakan untuk hal kebaikan atau justru digunakan untuk keburukan. Tetapi walau bagaimanapun juga,

bagi penulis, kegiatan penyadapan jika tidak terlalu diperlukan, merupakan suatu tindakan yang justru dapat mendatangkan kerugian.

Demi terjaganya kehormatan, wibawa serta martabat Negara, pemerintah Indonesia perlulah mempertahankan serta meningkatkan kebijaksanaan untuk mengambil setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional dengan melibatkan seluruh lembaga yang terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maupun para pakar-pakar akademisi Hubungan Internasional, agar setiap keputusan yang diambil mengeluarkan suatu kemanfaatan serta bisa menjadi rujukan penyelesaian sengketa Internasional.

Bagi pemerintah Australia, hendaknya bersikap bijaksana dalam menjunjung tinggi kedaulatan maupun independensi suatu Negara, serta menanamkan rasa kepercayaan terhadap Negara yang dianggap sebagai tetangga dan sahabat, bahwa hubungan bilateral yang sudah terjalin berpuluh-tahun lamanya akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kedua Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Djumadi M, 2004, "*Politik Luar Negeri Indonesia*", Diktat pengantar Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

_____, 2007, "*Pengantar Studi Hubungan Internasional*

Kawasan”, Diktat untuk Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Yogyakarta.

Clinton, W. David, 1986. “The National Interest: Normative Foundations” *The Review of Politics*, 48 (4), 495-519.

Hyndman, James E, 1970/1971. “National Interest and the New Look” *International Journal*, 26 (1), 5-18.

Mas' oed, Mohtar. 1994. *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Yogyakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES.

Morgenthau, Hans J., 1962. *The Impasse of American Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press, 191

Neuchterlein, Donald E., 1991. *America Recommitted: United States National Interests in a Restructured World*. Lexington: University Press of Kentucky.

Oppenheim, Felix E., 1987. “National Interest, Rationality, and Morality” *Political Theory*, 15 (3), 369-389.

Plano Jack C. Dan Olton Roy, 1999, *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ke-3*, diterjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda, CV Putra A Bardin,

Rochester, J. Martin, 1978. “The “National Interest” and Contemporary World Politics” *The Review of Politics*, 40 (1), pp. 77-96.

Roskin, Michael G., 1994. *National Interest: From Abstraction to Strategy*. USA: US Army War College.

Suryadi Bakry, Umar., 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta. Prenadamedia Grup.

Tokan Pureklolon, Thomas. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta. PT Gramedia

Pustaka Utama.

_____. 2018. Politik Nasionalisme. Malang, Jawa Timur.
Intrans Publishing.

Wahyu Saronto, Yohanes. 2019. Intelijen: Teori Intelijen dan pembangunan Jaringan. Yogyakarta. CV Andi Offset.

Artikel

KSAD, 60 ribu Intelijen Asing berkeliaran di Indonesia,
Koran Tempo, Edisi 5 Desember 2003

Website

Austarlia Spied On President Leaked Documents Reveal,
<http://www.abc.net.au> Diakses pada tanggal 8 September 2017

Upaya Indonesia Mengatasi Penyadapan,
<http://www.antarasumut.com> Diakses pada tanggal 8 Spetember 2017

Indonesia Panggil Dubes Australia soal dugaan mata-mata
<http://www.voaindonesia.com> Diakses pada tanggal 8 September 2017

Presiden minta rakyat tenang sikapi penyadapan,
<http://www.antaraneews.com> Diakses tgl 8 September 2017